



Katalog BPS :

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2008 - 2009



Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia



Katalog BPS :

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2008 - 2009

<https://www.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2008 – 2009

ISSN :
Nomor Publikasi :
Katalog :

Ukuran Buku : 17.6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xii + 91 halaman

Naskah :
Sub Direktorat Konsistensi Statistik

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik

Dicetak Oleh :
CV. Nario Sari

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Pembangunan manusia adalah sebuah proses perluasan pilihan bagi manusia, khususnya dalam mengakses hasil pembangunan seperti memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup; dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah; sedangkan dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Angka IPM disajikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penyajian angka IPM menurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antardaerah. Dengan mengetahui peta pembangunan manusia di semua daerah, maka diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk.

Semoga publikasi berjudul “Indeks Pembangunan Manusia 2008-2009” ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini.

Jakarta, Desember 2010
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
REPUBLIK INDONESIA

Rusman Heriawan

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Penulisan	4
1.3 Sistematika Penulisan	4
1.4 Sumber Data	5
 BAB II. METODOLOGI PENGHITUNGAN IPM	 7
2.1 Pengertian IPM.....	9
2.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia	9
2.2.1 Angka Harapan Hidup	9
2.2.2 Tingkat Pendidikan	9
2.2.3 Standar Hidup Layak	10
2.3 Penyusunan Indeks	12
2.4 Reduksi <i>Shortfall</i>	13
 BAB III. HASIL-HASIL IPM	 15
3.1 Perkembangan IPM	17
3.2 Perkembangan Komponen IPM	20
3.2.1 Angka Harapan Hidup	20
3.2.2 Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah.....	23
3.2.3 Daya Beli	28
 BAB IV. DISPARITAS ANTAR WILAYAH	 31
4.1 Capaian IPM.....	33
4.4.1 Capaian IPM Provinsi	33
4.4.2 Capaian IPM Kabupaten/Kota	40
4.2 Status Pembangunan	43
4.3 Disparitas Pembangunan Manusia	44
 BAB V. KETERKAITAN KOMPONEN IPM DENGAN VARIABEL SOSIAL EKONOMI	 47
5.1 Indikator Kesehatan	50
5.2 Indikator Pendidikan	51
5.2.1 Angka Melek Huruf	52
5.2.2 Rata-rata Lama Sekolah	53
5.3 Indikator Daya Beli	54

DAFTAR ISI

DAFTAR PUSTAKA 55

TIM PENULIS..... 57

LAMPIRAN-LAMPIRAN 61

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)	11
Tabel 2.2	Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM.....	12
Tabel 4.1	Provinsi dengan Reduksi <i>Shortfall</i> Tinggi, 2008-2009	39
Tabel 4.2	Provinsi dengan Reduksi <i>Shortfall</i> Rendah, 2008-2009	39
Tabel 4.3	Kabupaten dan Kota dengan IPM Tertinggi, 2008-2009	40
Tabel 4.4	Kabupaten dan Kota dengan IPM Terendah, 2008-2009	41
Tabel 4.5	Sepuluh Kabupaten dan Kota yang Menghasilkan Reduksi <i>Shortfall</i> Terbesar, 2008-2009.....	42
Tabel 4.6	Sepuluh Kabupaten dan kota yang Menghasilkan Reduksi <i>Shortfall</i> Terendah, 2008-2009.....	42
Tabel 4.7	Status Pembangunan Provinsi, 2008-2009	43
Tabel 4.8	Status Pembangunan Kabupaten/Kota, 2008-2009....	44
Tabel 4.9	Perbedaan Kemajuan Pembangunan Manusia antara Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur, 2009.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Penghitungan IPM	11
Gambar 3.1	Perkembangan IPM, 1996-2009	18
Gambar 3.2	Perkembangan Reduksi <i>Shortfall</i> , 1996-2009.....	18
Gambar 3.3	Perkembangan Komponen IPM, 2007-2009	20
Gambar 3.4	Perkembangan Angka Harapan Hidup (tahun) 1996-2009.....	21
Gambar 3.5	Angka Harapan Hidup (tahun) Menurut Provinsi, 2008	22
Gambar 3.6	Angka Harapan Hidup (tahun) Menurut Provinsi, 2009	22
Gambar 3.7	Perkembangan Angka Melek Huruf (persen), 1996-2009	24
Gambar 3.8	Angka Melek Huruf (persen) Menurut Provinsi, 2008	25
Gambar 3.9	Angka Melek Huruf (persen) Menurut Provinsi, 2009	25
Gambar 3.10	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (tahun), 1996-2009	26
Gambar 3.11	Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Menurut Provinsi, 2008	27
Gambar 3.12	Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Menurut Provinsi, 2009	27
Gambar 3.13	Perkembangan Daya Beli Masyarakat (ribu rupiah ppp), 1999-2009	28
Gambar 3.14	Daya Beli Masyarakat (ribu rupiah ppp) Menurut Provinsi, 2008	30
Gambar 3.15	Daya Beli Masyarakat (ribu rupiah ppp) Menurut Provinsi, 2009	30
Gambar 4.1	IPM Provinsi Menurut Peringkat, 2008	34
Gambar 4.2	IPM Provinsi Menurut Peringkat, 2009	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.3	Provinsi dengan IPM Tertinggi, 2008 - 2009	35
Gambar 4.4	Provinsi dengan IPM Terendah, 2008 - 2009	36
Gambar 4.5	Reduksi <i>Shortfall</i> dan IPM Provinsi, 2009.....	37
Gambar 4.6	Kisaran IPM Tingkat Provinsi, 2009.....	38

<https://www.bps.go.id>



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	IPM dan Komponen, 2008-2009.....	61
Lampiran 2	Output <i>Eviews</i>	79
Lampiran 3	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi Tahun 2009.....	87
Lampiran 4	Angka Harapan Hidup Menurut Provinsi Tahun 2009.....	88
Lampiran 5	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2009.....	89
Lampiran 6	Angka Melek Huruf Menurut Provinsi Tahun 2009.....	90
Lampiran 7	Paritas Daya Beli Menurut Provinsi Tahun 2009.....	91

PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, manusia selalu menjadi sasaran dari pembangunan suatu bangsa. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (UNDP, BPS dan Bappenas; Laporan Pembangunan Manusia 2004). Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan bukan alat dari pembangunan. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar masyarakat dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, dan buta huruf.

Berbagai ukuran pembangunan manusia telah dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat membandingkan antarwilayah atau antarnegara. Untuk itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).

IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR (*Human Development Report*). IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, data IPM digunakan sebagai salah satu komponen dasar dalam penyusunan Dana Alokasi Umum/DAU, selain jumlah penduduk, luas wilayah, PDRB per-kapita dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choices of people*). IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah wilayah dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan sehat (*longevity*) yang diukur dengan angka harapan hidup saat lahir (e_0), pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling*), serta standar hidup layak (*decent living standard*) yang diukur dengan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*).

Secara umum, perkembangan IPM di Indonesia periode 2004-2009 terus mengalami peningkatan. Perkembangan IPM menunjukkan peningkatan capaian

PENDAHULUAN

kualitas pembangunan manusia seiring dengan membaiknya perekonomian negara. Hal ini terjadi karena adanya perubahan satu atau lebih komponen IPM dalam periode tersebut. Perubahan yang dimaksud dapat berupa peningkatan atau penurunan besaran dari komponen IPM yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil perkapita.

Saat ini pemerintah menunjukkan perhatian lebih terhadap isu pembangunan manusia. Analisis IPM tidak dapat dilepaskan dari indikator-indikator komponen penyusun IPM. Setiap perubahan pada indikator tersebut memberikan pengaruh terhadap pembangunan manusia secara keseluruhan. Oleh sebab itu, analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi komponen IPM menjadi penting karena hal ini secara tidak langsung mempengaruhi angka IPM. Sebagai contoh dalam mengukur angka harapan hidup maka terlebih dahulu harus ditentukan tingkat kematian penduduk. Tingkat kematian ditentukan oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan pangan, kemiskinan, keadaan gizi, penyakit menular, keadaan fasilitas kesehatan, kecelakaan, bencana, kelaparan masal dan lain-lain.

1.2 Tujuan Penulisan

Secara umum, publikasi ini akan menyajikan data dan analisis IPM selama tahun 2008-2009. Data IPM secara lengkap dapat dilihat pada tabel lampiran. Untuk melihat perkembangan IPM juga digunakan data IPM pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, publikasi ini juga akan menganalisis perkembangan masing-masing komponen IPM dan disparitas IPM antarwilayah. Selain itu analisis mengenai determinan IPM juga akan disajikan.

Secara khusus, publikasi ini bertujuan :

1. Menyajikan perkembangan IPM dan komponennya secara nasional.
2. Menyajikan analisis perkembangan IPM dan komponennya antarpropinsi dan antarkabupaten/kota.
3. Menyajikan analisis determinan komponen IPM.

1.3 Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri dari lima bab. Bab I, menyajikan latar belakang penulisan. Bab ini menguraikan pentingnya IPM sebagai ukuran untuk melihat kemajuan dalam pembangunan manusia. Metodologi penghitungan IPM akan disajikan pada Bab II yang menguraikan tentang metode penghitungan masing-

masing komponen sampai terbentuknya IPM. Selanjutnya pada Bab III akan disajikan hasil analisis IPM dan perkembangan komponennya. Kemudian Bab IV menguraikan disparitas IPM antarwilayah baik propinsi maupun kabupaten/kota. Analisis determinan komponen IPM disajikan pada Bab V.

1.4 Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan adalah data Susenas Kor dan Susenas Modul Konsumsi, data Supas, Proyeksi Penduduk (SP 2000) dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Data Susenas Kor digunakan untuk menghitung dua indikator pembentuk IPM yaitu Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Sementara Angka Harapan Hidup (e_0) dihitung menggunakan data Supas dan Proyeksi Penduduk. Sedangkan indikator daya beli atau PPP (*Purchasing Power Parity*) dihitung menggunakan data Susenas modul konsumsi yang didasarkan pada 27 komoditi (lihat Tabel 2.1). Untuk mendapatkan pengeluaran per kapita riil digunakan Indeks Harga Konsumen sebagai deflator.

METODOLOGI PENGHITUNGAN IPM

<https://www.kes.go.id>



2

2.1 Pengertian IPM

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak (Gambar 2.1). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

2.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

2.2.1 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).

Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.

2.2.2 Tingkat Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan angka melek huruf. Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah memiliki bobot sepertiga

dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, angka melek huruf juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100, sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Nilai 100 menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis sedangkan nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya.

2.2.3 Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

$$\begin{array}{ll} C_{(i)} = C_{(i)} & \text{Jika } C_{(i)} < Z \\ = Z + 2(C_{(i)} - Z)^{1/2} & \text{Jika } Z < C_{(i)} < 2Z \\ = Z + 2(Z)^{1/2} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{1/3} & \text{Jika } 2Z < C_{(i)} < 3Z \end{array}$$

dan seterusnya.

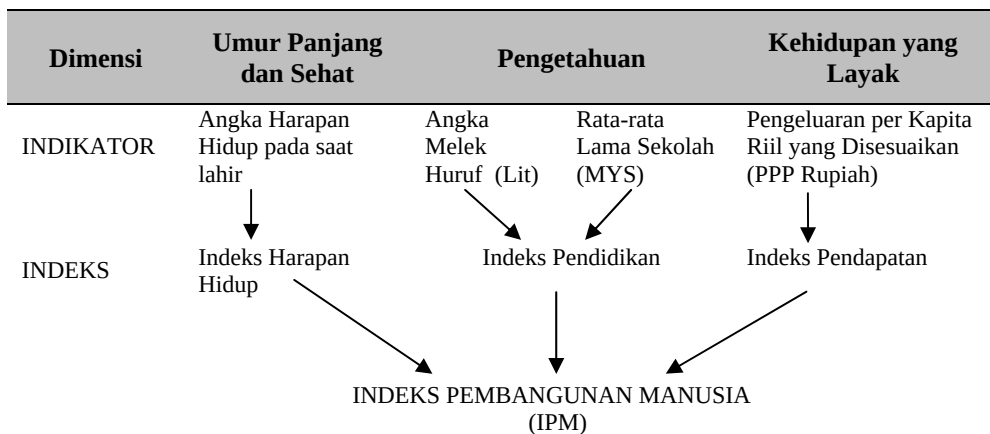
Dimana : $C_{(i)}$ = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita
 Z = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbitrer sebesar Rp.549.500 per kapita per tahun atau Rp. 1.500 per kapita per hari

Tabel 2.1 Komoditi Kebutuhan Pokok Sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

Komoditi	Unit	Komoditi	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Beras Lokal	Kg	Lanjutan	
2. Tepung terigu	Kg	15. Pepaya	Kg
3. Singkong	Kg	16. Kelapa	Butir
4. Tuna/Cakalang	Kg	17. Gula	Ons
5. Teri	Ons	18. Kopi	Ons
6. Daging sapi	Kg	19. Garam	Ons
7. Ayam	Kg	20. Merica	Ons
8. Telur	Butir	21. Mie instan	80 Gram
9. Susu kental manis	397 Gram	22. Rokok Kretek	10 batang
10. Bayam	Kg	23. Listrik	Kwh
11. Kacang panjang	Kg	24. Air minum	M3
12. Kacang tanah	Kg	25. Bensin	Liter
13. Tempe	Kg	26. Minyak tanah	Liter
14. Jeruk	Kg	27. Sewa rumah	Unit

Penghitungan indeks daya beli dilakukan berdasarkan 27 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam tabel 2.1. Batas maksimum dan minimum penghitungan daya beli digunakan seperti terlihat dalam tabel 2.2. Batas maksimum daya beli adalah sebesar Rp 732.720,- sementara sampai dengan tahun 1996 batas minimumnya adalah Rp 300.000,-. Pada tahun 1996 dengan mengikuti kondisi pasca krisis ekonomi batas minimum penghitungan PPP diubah dan disepakati menjadi Rp 360.000,-.

Gambar 2.1 Diagram Penghitungan IPM



2.3 Penyusunan Indeks

Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X_{(i)} = \frac{X_{(i)} - X_{(\min)}}{X_{(\max)} - X_{(\min)}} \quad \text{..... (1)}$$

Dimana : $X_{(i)}$ = Komponen IPM ke-i
 $X_{(\min)}$ = Nilai minimum dari komponen IPM ke-i
 $X_{(\max)}$ = Nilai maksimum dari komponen IPM ke-i

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2 Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Angka Harapan Hidup (Tahun)	85	25	Standar UNDP
2. Angka Melek Huruf (Persen)	100	0	Standar UNDP
3. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	15	0	
4. Daya Beli (Rupiah)	732.720 ^a	300.000 (1996) 360.000 ^b (1999,dst)	Pengeluaran per Kapita Riil disesuaikan

Keterangan :

^{a)} Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018

^{b)} Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$\text{IPM}_j = \frac{1}{3} \sum_j \text{Indeks } X_{(i,j)} \quad \text{..... (2)}$$

Dimana : Indeks $X_{(i,j)}$ = Indeks komponen IPM ke i untuk wilayah ke j
 i = 1, 2, 3 (urutan komponen IPM)
 j = 1, 2 k (wilayah)

2.4 Reduksi *shortfall*

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran reduksi *shortfall* per tahun. Reduksi *shortfall* menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai titik IPM ideal (100). Semakin tinggi nilai reduksi *shortfall*, semakin cepat peningkatan IPM.

Reduksi *shortfall* dihitung dengan :

$$r = \left[\frac{(IPM_{t+n} - IPM_t)}{(IPM_{ideal} - IPM_t)} \times 100 \right]^{1/n} \dots\dots\dots (3)$$

Dimana : r = Reduksi *Shortfall*
t = tahun
n = selisih tahun antar IPM
IPM_{ideal} = 100

HASIL-HASIL IPM

3

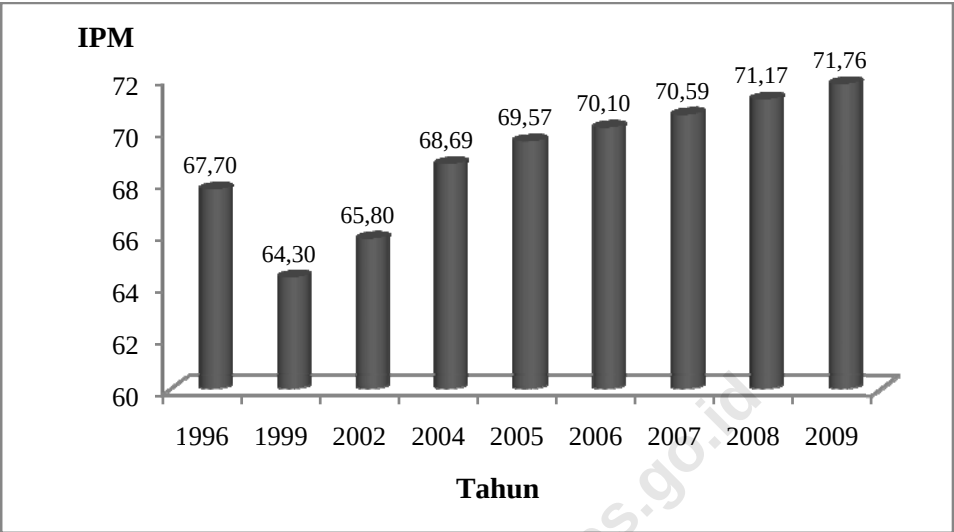
Pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang agar penduduk dapat hidup layak. Tujuan tersebut akan dapat tercapai jika setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat dan panjang umur, untuk berpendidikan dan berketrampilan serta mempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup. Secara keseluruhan tingkat pencapaian pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi selama periode 1997-2009 menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari meningkatnya IPM dengan laju tingkat pencapaian menuju sasaran (*shortfall reduction*) yang cukup besar hampir di seluruh provinsi. Bab ini akan membahas mengenai perkembangan IPM secara nasional, provinsi maupun kabupaten/kota berikut komponennya.

3.1 Perkembangan IPM

Perkembangan IPM Indonesia berdasarkan penghitungan BPS dapat dilihat dalam Gambar 3.1. Secara umum pembangunan manusia di Indonesia selama periode 1996-2009 mengalami peningkatan. Hal ini berhubungan langsung dengan perbaikan beberapa indikator sosial ekonomi. Misalnya, angka melek huruf dewasa terus meningkat seiring dengan meningkatnya program pemerintah dalam pengentasan buta aksara.

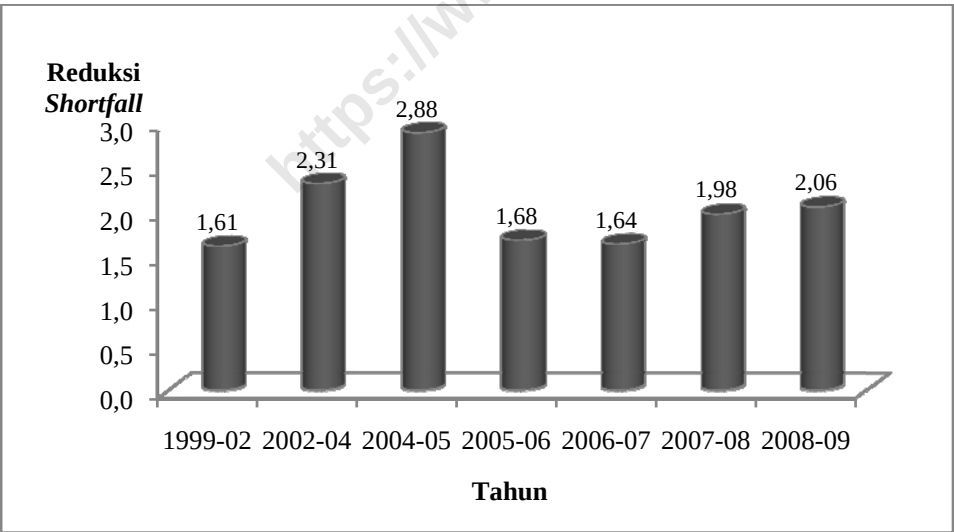
Pada tahun 1996, capaian IPM Indonesia sebesar 67,70. Namun, capaian IPM Indonesia tahun 1999 mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi sebesar 64,30. Hal ini terjadi karena penurunan daya beli masyarakat sebagai akibat krisis ekonomi tahun 1998. Capaian IPM ini kembali meningkat pada tahun 2002 menjadi 65,80, akan tetapi kenaikan tersebut masih belum mampu melampaui IPM Indonesia tahun 1996. Semenjak tahun 2004-2009, angka IPM terus mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2004 yang telah mampu mengembalikan keadaan pada posisi tahun 1996 bahkan melampauinya, yaitu sebesar 68,69. Sejak tahun 2004 hingga tahun 2009 capaian IPM terus meningkat setiap tahunnya, hingga mencapai 71,76 pada tahun 2009.

Gambar 3.1 Perkembangan IPM, 1996-2009



Sumber: BPS

Gambar 3.2 Perkembangan Reduksi *Shortfall*, 1996-2009



Sumber: BPS

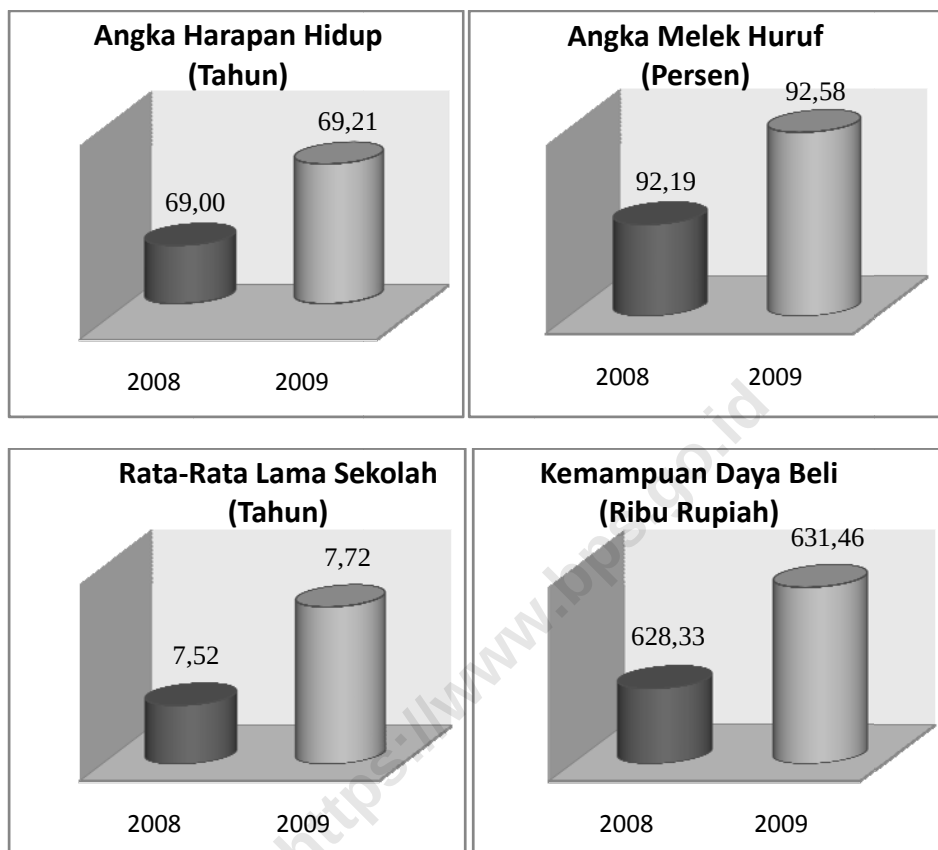
Pola perkembangan IPM selama periode 1996-2009 menunjukkan adanya pengurangan jarak IPM terhadap nilai ideal. Perbedaan antartahun dalam hal pengurangan jarak tersebut digambarkan dengan ukuran reduksi *shortfall* yang menunjukkan adanya perbedaan kecepatan dari tahun ke tahun. Kecepatan

peningkatan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2004-2005 sebesar 2,88. Namun sayang, kecepatan yang tinggi ini hanya terjadi selama 1 tahun karena pada tahun-tahun berikutnya reduksi *shortfall* berada di kisaran 1 dan baru berada dikisaran 2 kembali pada tahun 2008-2009, namun belum mampu melampaui reduksi *shortfall* pada tahun 2004-2005.

Perkembangan IPM dapat terjadi karena adanya perubahan satu atau lebih komponen IPM selama periode 2008-2009. Perubahan yang dimaksud dapat berupa peningkatan atau penurunan besaran komponen IPM yang meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita. Adapun perubahan dari masing-masing komponen ini sangat ditentukan oleh berbagai faktor.

Selama periode 2008-2009, angka IPM menunjukkan peningkatan. Hal ini mencerminkan kinerja pemerintah yang terus membaik dari waktu ke waktu. Keseriusan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam mengupayakan segala bentuk kemudahan bagi masyarakat luas untuk dapat mengakses sarana pendidikan dan kesehatan yang mendasar terus ditingkatkan. Upaya tersebut antara lain ditempuh baik melalui peningkatan kualitas serta penambahan jumlah sarana maupun pembebasan pungutan/biaya untuk mendapatkan pelayanan melalui beberapa program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), keaksaraan fungsional dan pendidikan luar sekolah, pelayanan kesehatan gratis, dan sebagainya.

Dalam prakteknya, peningkatan indikator sosial seperti kesehatan dan pendidikan tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek. Hal ini berbeda dengan komponen daya beli yang dapat bertambah secara nyata dalam waktu yang relatif singkat seiring dengan keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Untuk melihat lebih jauh hasil yang telah dicapai selama setahun terakhir pada proses pembangunan manusia perlu kiranya kita telaah satu per satu kemajuan yang didapat untuk masing-masing komponen IPM.

Gambar 3.3 Perkembangan Komponen IPM, 2008-2009

Sumber: BPS

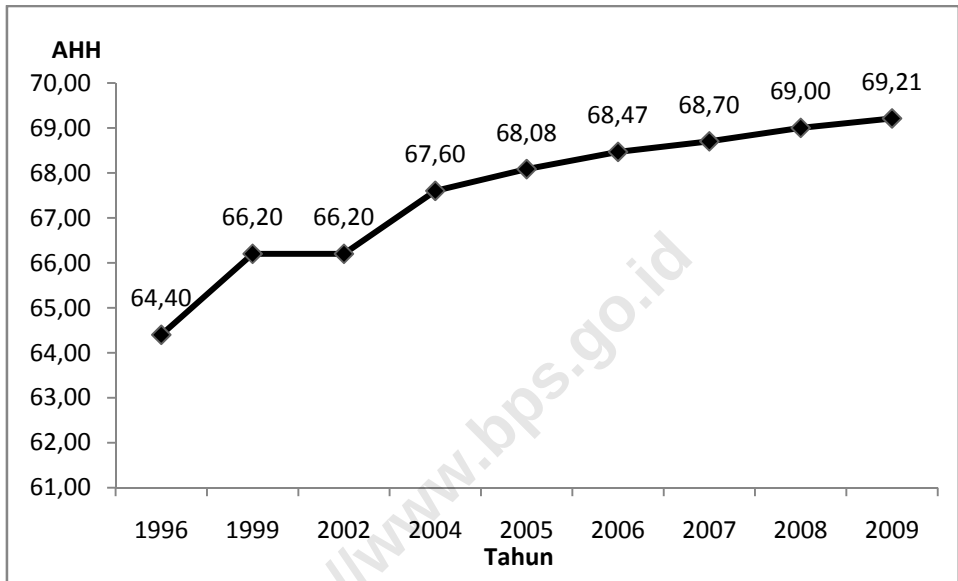
3.2 Perkembangan Komponen IPM

3.2.1 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Gambar 3.4 memperlihatkan perkembangan AHH selama kurun waktu 12 tahun terakhir. Pada gambar tersebut terlihat, selama periode 1996-2009 perkembangan AHH menunjukkan peningkatan. Pada tahun 1996, AHH penduduk Indonesia baru 64,4 tahun. Perkembangan selanjutnya, selama tahun 1999-2002 AHH tidak menunjukkan peningkatan, yaitu tetap sebesar 66,2 tahun. Setelah berjalan tiga tahun (2002-2005) AHH meningkat sebesar 1,9 poin sehingga menjadi 68,10

tahun. AHH terus meningkat dari tahun 2005 sampai tahun 2009. Namun dalam kurun waktu 2005-2009 kenaikan AHH kurang dari 0,5 tahun dan relatif melambat dibanding tahun sebelumnya.

Gambar 3.4 Perkembangan Angka Harapan Hidup (tahun), 1996-2009



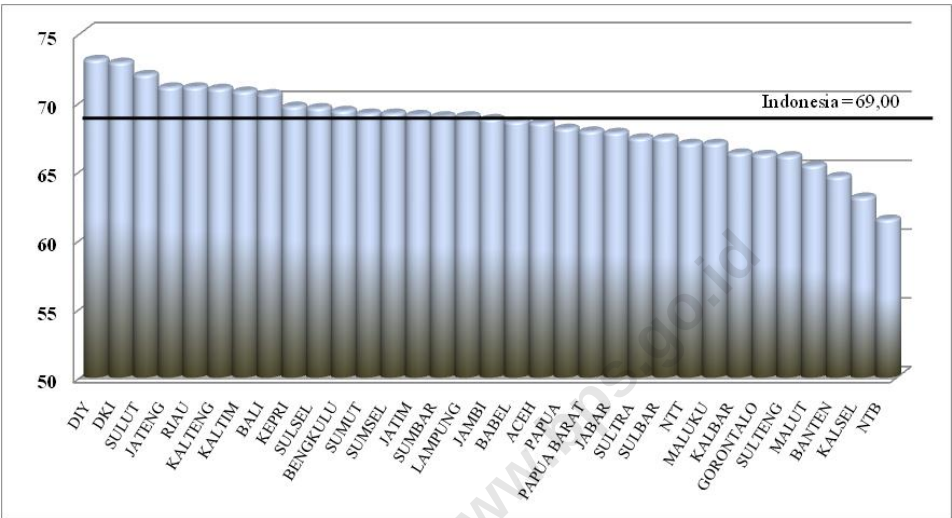
Sumber: BPS

Peningkatan AHH tahun 2009 hanya 0,21 tahun hingga mencapai 69,21 tahun. Untuk itu perlu upaya peningkatan kesehatan yang lebih komprehensif agar perbaikan derajat kesehatan melalui penurunan angka kematian bayi dapat terlaksana. Tingkat kesehatan bayi juga dipengaruhi secara nyata oleh kondisi kesehatan ibu serta lingkungannya. Tidak sedikit anak yang terpaksa terlahir dengan berat badan lahir rendah karena dilahirkan oleh ibu yang menderita kekurangan gizi.

Dilihat menurut tingkat provinsi, angka harapan hidup tahun 2009 relatif bervariasi antara 61,80 sampai 73,16 tahun. DIY merupakan provinsi yang mempunyai angka harapan hidup tertinggi sedangkan Nusa Tenggara Barat adalah provinsi dengan angka harapan hidup terendah. DKI Jakarta sebagai ibukota negara menempati urutan kedua tertinggi dengan angka harapan hidup sebesar 73,05 tahun dan diikuti Sulawesi Utara di peringkat ketiga tertinggi dengan angka harapan hidup mencapai 72,12 tahun. Di sisi lain, urutan kedua terendah, di atas Nusa Tenggara Barat, adalah Kalimantan Selatan dengan angka harapan hidup sebesar 63,45 tahun, yang kemudian diikuti Banten di urutan

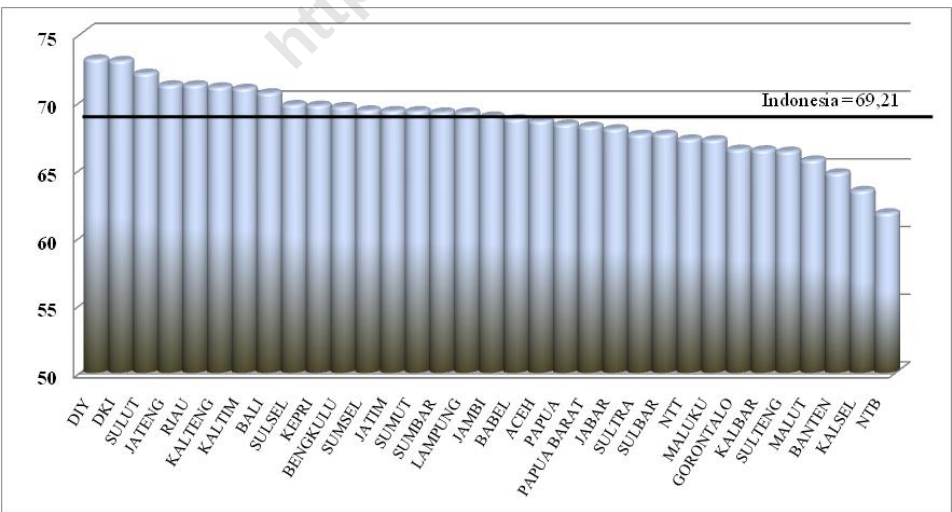
ketiga terendah dengan angka harapan hidup sebesar 64,75 tahun. Namun demikian, secara umum angka harapan hidup penduduk seluruh provinsi berada diatas 61 tahun.

Gambar 3.5 Angka Harapan Hidup (tahun) Menurut Provinsi, 2008



Sumber: BPS

Gambar 3.6 Angka Harapan Hidup (tahun) Menurut Provinsi, 2009



Sumber: BPS

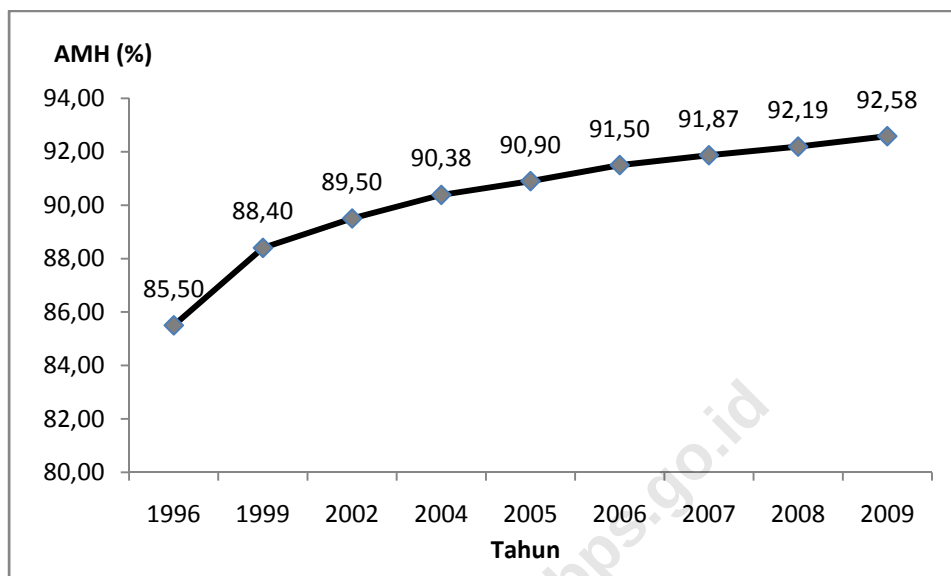
3.2.2 Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah

Pembangunan di bidang pendidikan akan membawa dampak positif yang cukup nyata di masa mendatang. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka rawan putus sekolah tampaknya harus terus digalakkan dan menjadi prioritas utama dengan diiringi pembangunan serta revitalisasi gedung-gedung sekolah sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan. Komposisi penduduk yang relatif besar di usia muda memerlukan persiapan sarana penunjang pendidikan yang memadai.

Pencapaian tingkat pendidikan yang cukup baik saat ini merupakan cermin dari keberhasilan perencanaan pembangunan di masa lalu. Yang perlu dilakukan saat ini adalah memelihara dan mempertajam upaya-upaya positif yang telah dirintis di masa lalu sehingga dapat dihasilkan capaian pendidikan lebih baik. Jika aspek pendidikan tidak ditangani secara baik dan lebih dini, dikhawatirkan pada rentang waktu yang akan datang berdampak cukup serius pada pencapaian angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan dalam IPM adalah angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia. Angka melek huruf menggambarkan persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang mampu baca tulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.

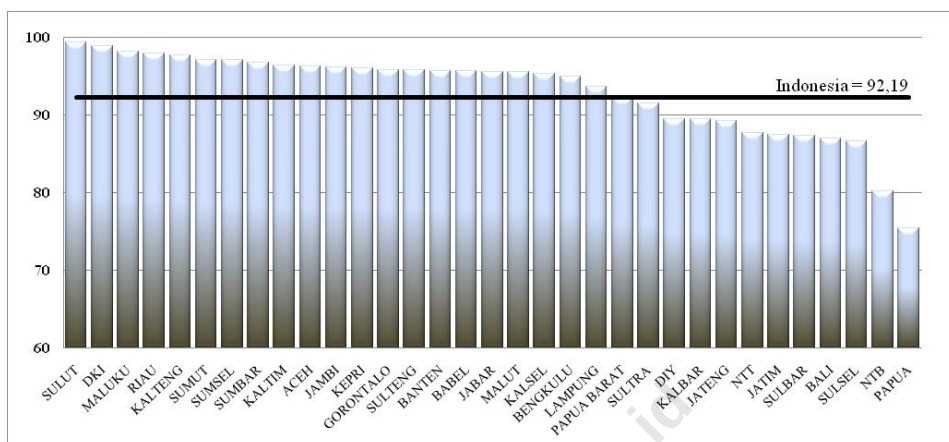
Angka Melek Huruf (AMH) selama tahun 1996-2009 terus meningkat meskipun kecepatannya relatif menurun. Peningkatan yang cukup cepat terjadi pada periode 1996-1999, yaitu sebesar 2,9 persen. Pada tahun 1996 angka melek huruf baru sebesar 85,5 persen sedangkan pada tahun 1999 telah mencapai 88,4 persen. Meski antara periode tersebut terjadi krisis, tampaknya hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan AMH di Indonesia.

Gambar 3.7 Perkembangan Angka Melek Huruf (persen), 1996-2009

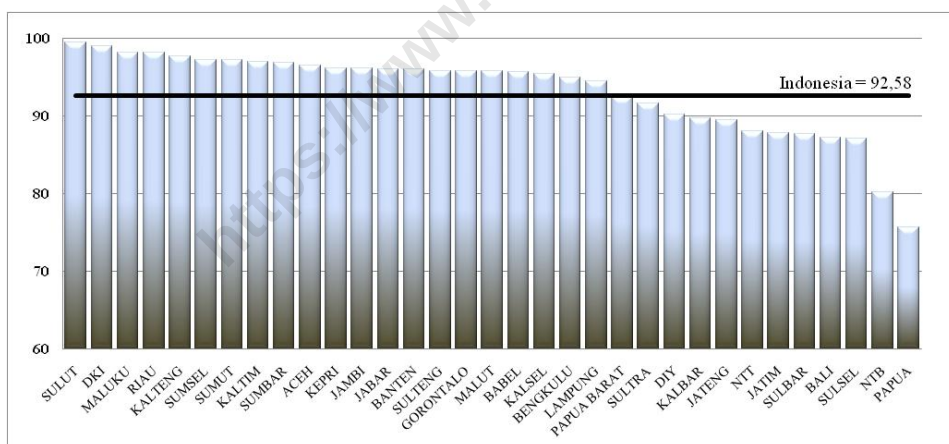
Sumber: BPS

Pada periode berikutnya perkembangan AMH menunjukkan perlambatan kecepatan. Pada periode 1999-2002, AMH hanya meningkat sebesar 1,1 persen sedangkan pada periode 2002-2005 meningkat kembali menjadi 1,4 persen. Namun sayang, sejak periode 2005-2006 perkembangan AMH mulai kembali melambat menjadi 0,6 persen, kemudian menjadi 0,4 persen pada periode 2006-2007, kemudian menjadi 0,3 persen pada periode 2007-2008, dan 0,1 persen pada periode 2008-2009 (Gambar 3.7).

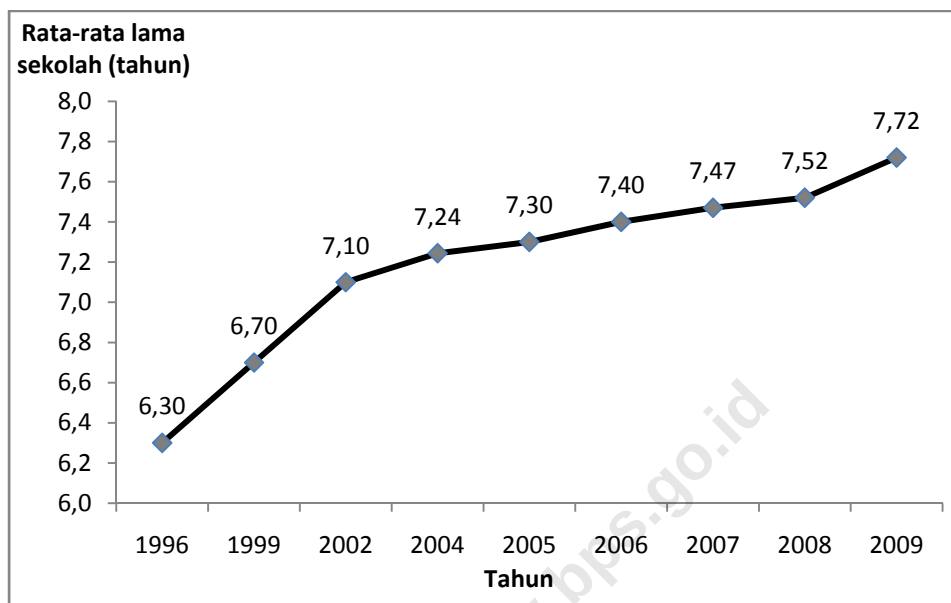
Indikator pendidikan lainnya yang merupakan komponen IPM adalah rata-rata lama sekolah. Selama periode 1996-2009, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang relatif lambat. Rata-rata lama sekolah naik dari 6,30 tahun pada tahun 1996 menjadi 7,72 tahun pada tahun 2009. Hal ini berarti tingkat pendidikan penduduk Indonesia meningkat dari setara dengan lulus tingkat sekolah dasar pada tahun 1996, menjadi setara dengan kelas satu sekolah tingkat menengah pertama pada tahun 2009. Selama 13 tahun, kenaikan rata-rata lama sekolah hanya sebesar 1,4 tahun atau kurang dari 0,15 per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk.

Gambar 3.8 Angka Melek Huruf (persen) Menurut Provinsi, 2008

Sumber: BPS

Gambar 3.9 Angka Melek Huruf (persen) Menurut Provinsi, 2009

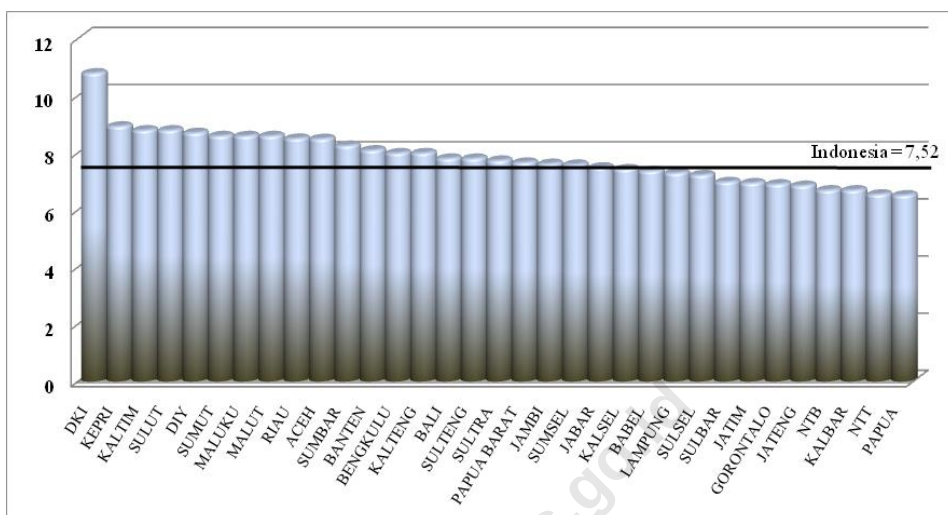
Sumber: BPS

Gambar 3.10 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (tahun), 1996-2009

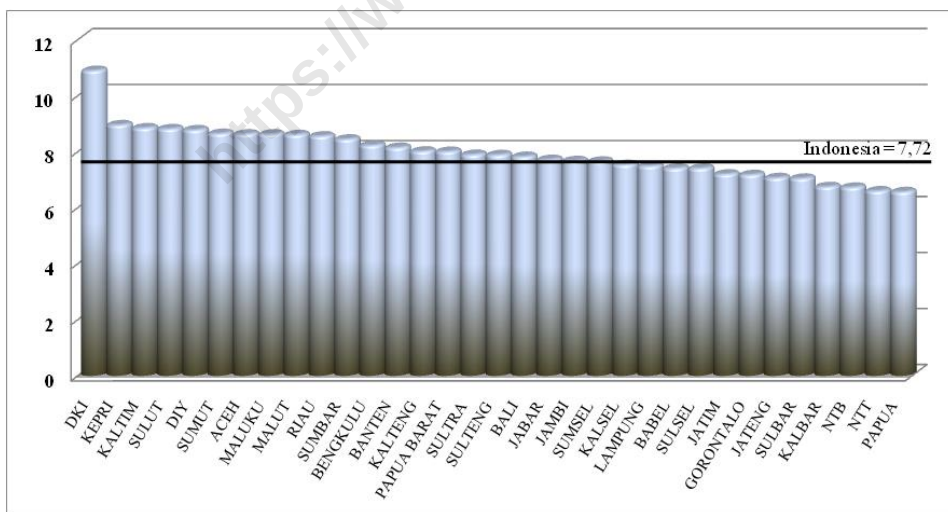
Sumber: BPS

Sementara itu, provinsi dengan rata-rata lama sekolah terendah adalah Papua, yaitu sebesar 6,57 tahun, kemudian diikuti oleh Nusa Tenggara Timur pada peringkat kedua terendah sebesar 6,60 tahun. Sedangkan untuk peringkat ketiga terendah ditempati oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 6,73 tahun.

Relatif rendahnya peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah dimungkinkan karena masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat pendidikan dasar, sehingga meskipun partisipasi sekolah penduduk usia muda sudah sedemikian dipacu peningkatannya namun belum terasa hasilnya secara nyata. Perlu kiranya disusun intervensi strategis dalam upaya menaikkan kualitas SDM dari sisi pendidikan. Program pendidikan dasar 9 tahun seyogyanya juga diupayakan lebih serius bagi penduduk putus sekolah yang belum mengenyam pendidikan dasar maupun menengah pertama meskipun usianya telah beranjak dewasa. Salah satu jalan keluarnya adalah dengan lebih mengoptimalkan pemanfaatan pendidikan luar sekolah (PLS) seperti program Paket A, B dan C dan keaksaraan fungsional.

Gambar 3.11 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Menurut Provinsi, 2008

Sumber: BPS

Gambar 3.12 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Menurut Provinsi, 2009

Sumber: BPS

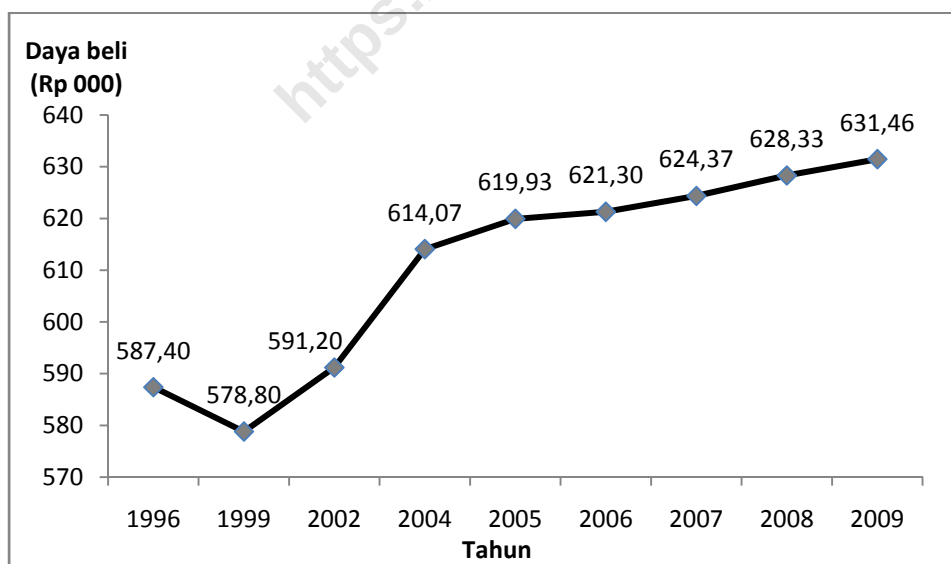
Apabila capaian rata-rata lama sekolah dikaitkan dengan target yang diusulkan UNDP, maka rata-rata pendidikan penduduk di Indonesia relatif

tertinggal. Masih perlu kerja keras untuk mengejar ketertinggalan sampai batas minimal pendidikan yang diusulkan UNDP yaitu 15 tahun. Komitmen pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya bersekolah perlu terus digalakkan dan disosialisasikan agar dalam jangka panjang dapat terwujud SDM yang berkualitas.

3.2.3 Daya Beli

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antarwilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan demikian, kemampuan daya beli masyarakat antara satu wilayah dengan wilayah lain berbeda. Perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antarwilayah masih belum terbanding, untuk itu perlu dibuat adanya standarisasi. Sehingga satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. Dengan adanya standarisasi ini, maka perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antarwilayah dapat dibandingkan.

Gambar 3.13 Perkembangan Daya Beli Masyarakat (ribu rupiah ppp), 1996-2009

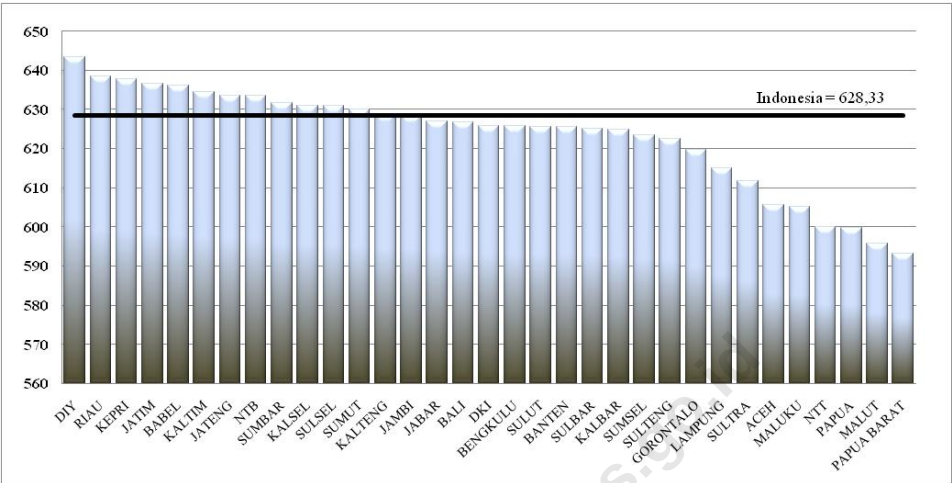


Sumber: BPS

Kemampuan daya beli masyarakat sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 3.13 terlihat terus meningkat kecuali pada tahun 1999. Peningkatan daya beli masyarakat terlihat sejak tahun 2002 hingga tahun 2009 meski jika dilihat dari kenaikan nominalnya tidak terlalu besar. Penurunan daya beli masyarakat yang terjadi pada periode 1996-1999 erat kaitannya dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang memburuk sebagai dampak dari krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Selanjutnya, setelah tahun 1999 daya beli masyarakat kembali terlihat mulai membaik dan pada tahun 2002 daya beli masyarakat sudah lebih tinggi dari pada tahun 1996 atau sebelum terjadinya krisis. Pada periode 2002-2005, daya beli masyarakat mengalami kenaikan yang cukup pesat, yaitu rata-rata mencapai 9,57 ribu rupiah per tahun. Namun pada periode-periode berikutnya, peningkatan daya beli masyarakat tampak berjalan melambat.

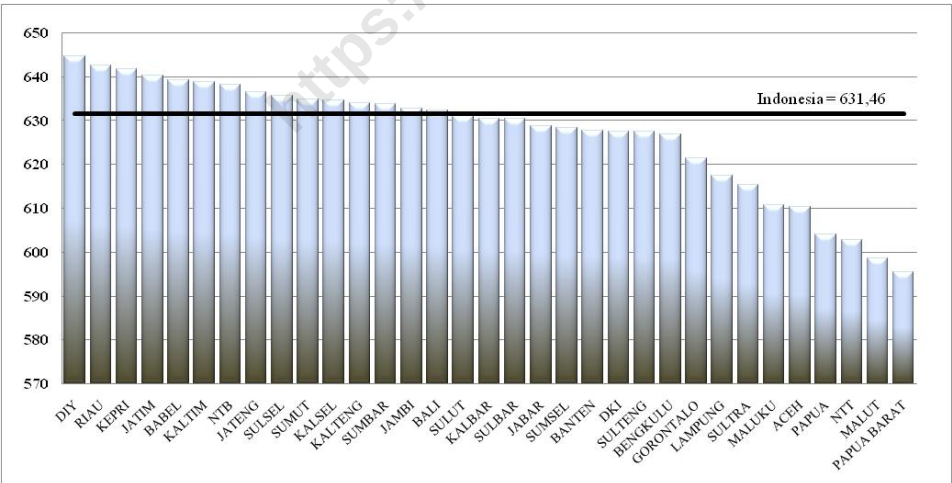
Dilihat menurut tingkat provinsi, diketahui bahwa daya beli masyarakat cukup bervariasi, mulai dari 595,28 ribu rupiah hingga 644,67 ribu rupiah. Lebih lanjut, diketahui bahwa tiga provinsi yang memiliki daya beli paling tinggi berasal dari wilayah Indonesia barat, yaitu Provinsi DI Yogyakarta dengan daya beli mencapai 644,67 ribu rupiah, kemudian diikuti Riau di peringkat kedua yang mencapai 642,55 ribu rupiah, dan peringkat ketiga adalah Kepulauan Riau yang mencapai 641,63 ribu rupiah. Sementara itu, tiga provinsi dengan kemampuan daya beli masyarakat terendah berasal dari wilayah Indonesia timur, yaitu Papua Barat dengan daya beli masyarakat sebesar 595,28 ribu, kemudian diikuti Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur dengan daya beli masyarakatnya masing-masing sebesar 603,88 ribu rupiah dan 602,60 ribu rupiah.

Gambar 3.14 Daya Beli Masyarakat (ribu rupiah ppp) Menurut Provinsi, 2008



Sumber: BPS

Gambar 3.15 Daya Beli Masyarakat (ribu rupiah ppp) Menurut Provinsi, 2009



Sumber: BPS

DISPARITAS ANTAR WILAYAH

4

Salah satu masalah pembangunan di Indonesia adalah kesenjangan pembangunan antarwilayah. Di wilayah Indonesia bagian barat, pembangunan berjalan cukup pesat, sebaliknya pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur relatif lambat. Hal ini juga terlihat dari hasil pembangunan manusia yang menunjukkan kesenjangan antarwilayah yang cukup signifikan. Bab ini akan memberikan ulasan mengenai kesenjangan pembangunan manusia antarwilayah di Indonesia.

Dalam analisis disparitas antarwilayah tidak dapat dilepaskan dari ulasan mengenai capaian IPM antarwilayah. Analisis capaian IPM antarwilayah berisi mengenai kinerja, peringkat dan reduksi *shortfall* provinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu disparitas pembangunan manusia lebih merupakan perbandingan IPM antardaerah.

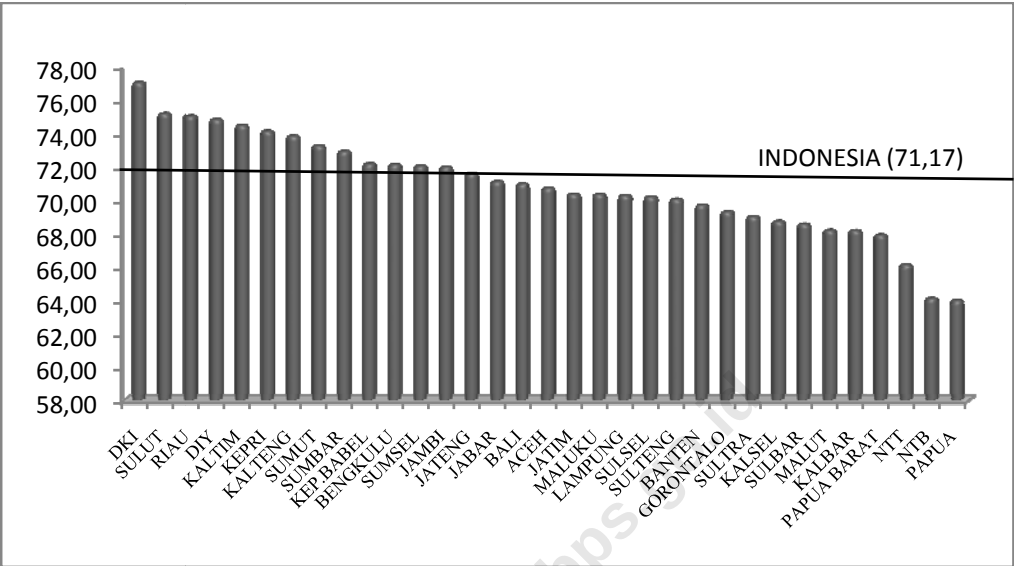
4.1 Capaian IPM

4.1.1 Capaian IPM Provinsi

Secara umum, gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di suatu provinsi dapat dilihat dari angka IPM provinsi. Perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun memberikan indikasi terjadinya peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia setiap tahunnya. Capaian angka IPM akan menentukan urutan (ranking) antardaerah. Meskipun demikian, untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah tidak mutlak dilihat dari urutan posisi (ranking), akan tetapi dapat juga berdasarkan besaran nilai reduksi *shortfall*. Berdasarkan ukuran itu terlihat seberapa besar akselerasi capaian pembangunan manusia dalam satu tahun.

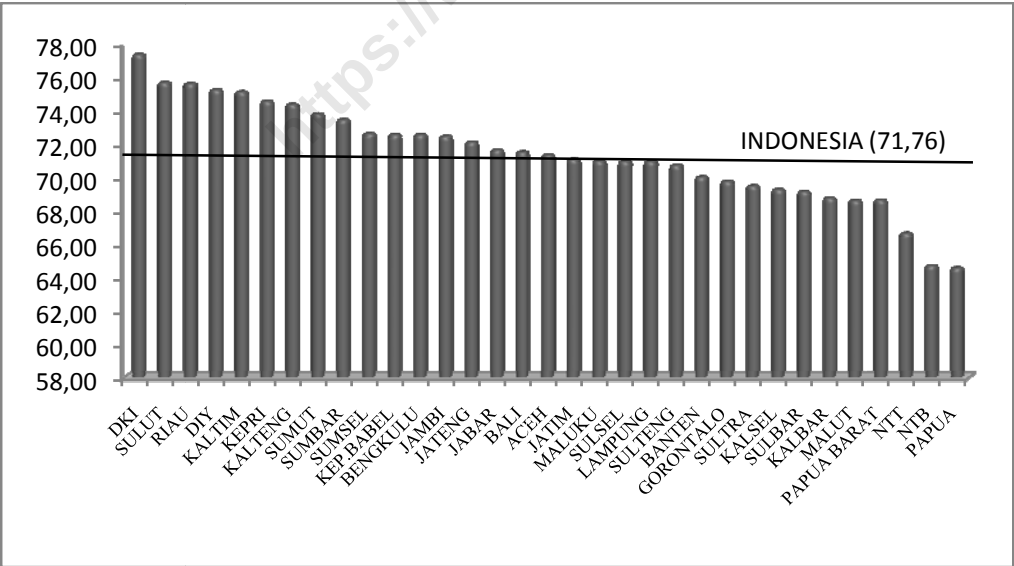
Capaian pembangunan manusia yang diukur dengan IPM menunjukkan peningkatan. Capaian IPM untuk nasional pada tahun 2008 adalah sebesar 71,17, sedangkan di tahun 2009 menjadi 71,76. Pada tingkat provinsi angka IPM cukup bervariasi. IPM tertinggi tahun 2009 diraih oleh DKI Jakarta dengan nilai 77,36 dan IPM terendah sebesar 64,53 untuk Papua. Perbedaan pencapaian IPM tertinggi dengan IPM terendah sekitar 12,83 poin. Dibandingkan dengan perbedaan pencapaian tahun 2008 yang sebesar 13,03 poin (tertinggi 77,03 untuk DKI Jakarta dan terendah 64,00 untuk Papua), maka perbedaan tahun 2009 relatif lebih rendah. Hal ini dapat diartikan bahwa disparitas pembangunan manusia di tingkat provinsi relatif menurun.

Gambar 4.1 IPM Provinsi Menurut Peringkat, 2008



Sumber : BPS

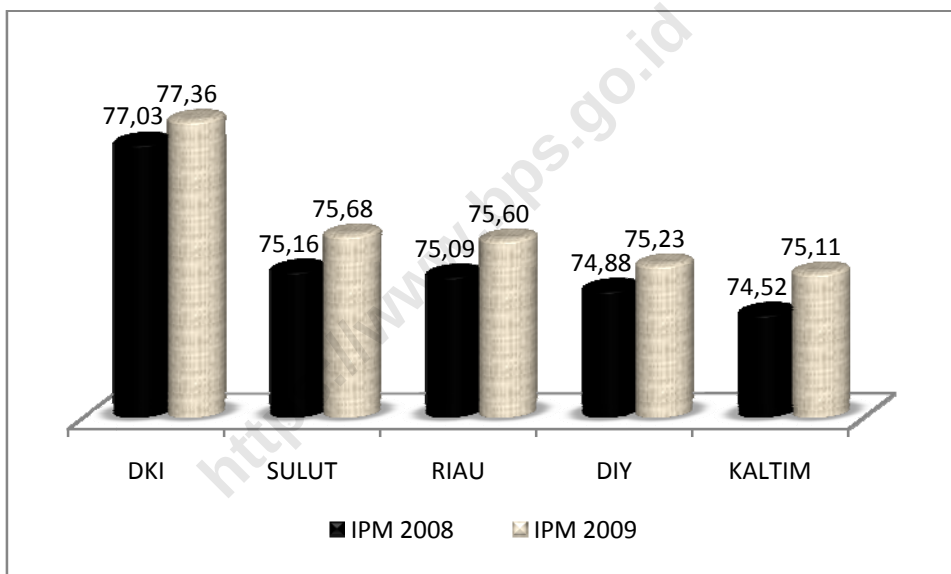
Gambar 4.2 IPM Provinsi Menurut Peringkat, 2009



Sumber : BPS

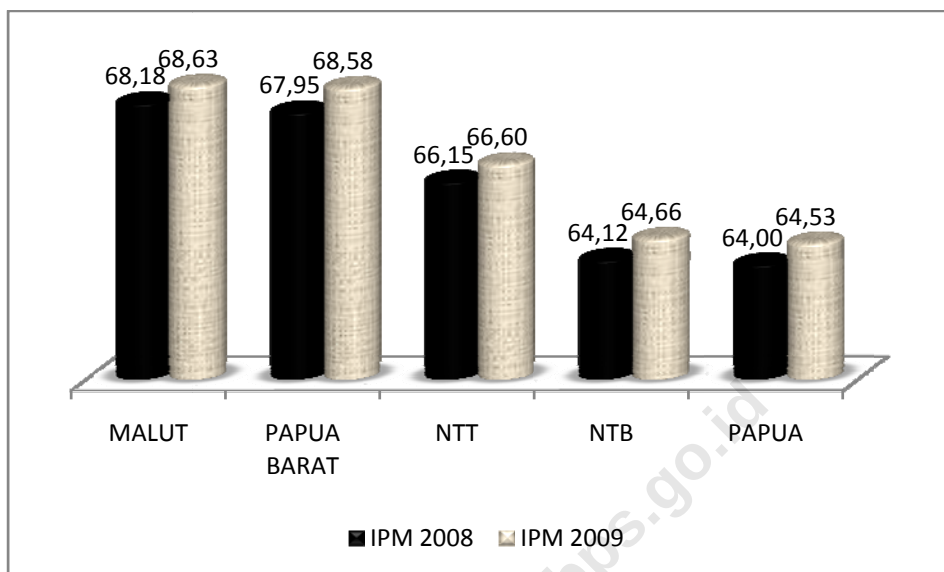
Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2009 DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan IPM tertinggi yaitu mencapai 77,36, kemudian disusul oleh Provinsi Sulawesi Utara (75,68), Provinsi Riau (75,60), Provinsi DI.Yogyakarta (75,23) dan Provinsi Kalimantan Timur (75,11). Selama empat tahun terakhir provinsi-provinsi ini selalu menduduki peringkat lima terbaik dalam pembangunan manusia, kecuali untuk Provinsi Kalimantan Timur baru 3 tahun terakhir ini masuk dalam kelompok 5 provinsi dengan IPM tertinggi. Sebelumnya urutan kelima ditempati oleh Provinsi Kalimantan Tengah, yang sejak tahun 2007 turun ke peringkat 7.

Gambar 4.3 Provinsi dengan IPM Tertinggi, 2008-2009



Sumber : BPS

Di sisi lain, provinsi dengan pencapaian IPM terendah adalah Papua yaitu sebesar 64,53. Sebelum Provinsi Papua, terdapat 4 provinsi dengan IPM terendah yaitu Nusa Tenggara Barat (64,66), Nusa Tenggara Timur (66,60), Papua Barat (68,58), dan Maluku Utara (68,63). Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi pergeseran komposisi peringkat 5 IPM terendah. Pada tahun 2009 Provinsi Maluku Utara baru masuk ke dalam lima terendah, dimana sebelumnya posisi tersebut diduduki oleh Provinsi Kalimantan Barat.

Gambar 4.4 Provinsi dengan IPM Terendah, 2008-2009

Sumber : BPS

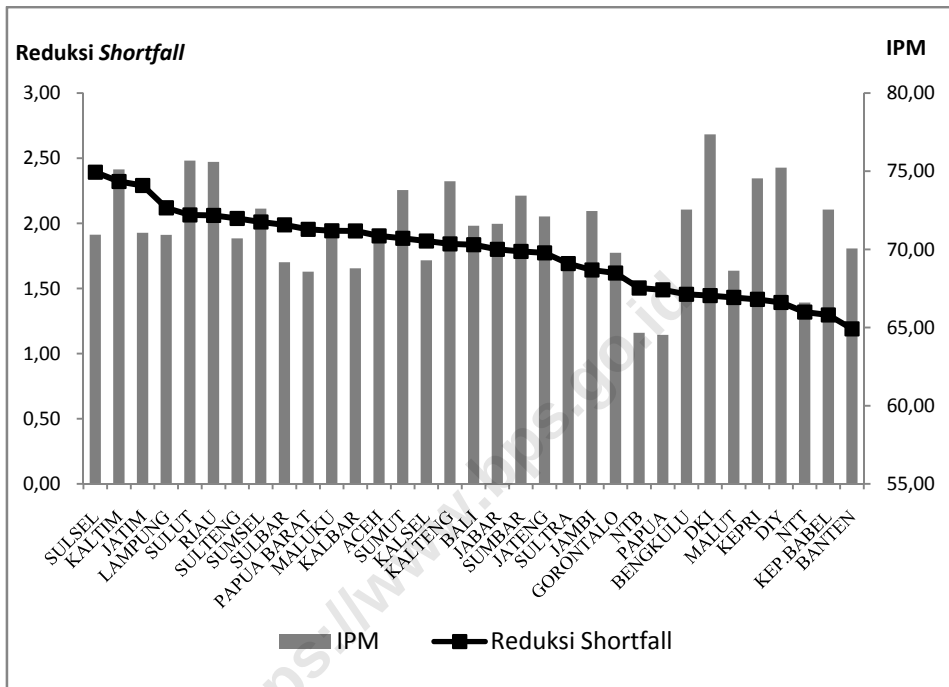
Selama periode 2008-2009, IPM di semua provinsi mengalami kenaikan dengan kecepatan yang bervariasi. Ada sejumlah provinsi mengalami peningkatan IPM secara cepat dan sebaliknya ada pula provinsi dengan peningkatan IPM relatif lambat. Laju kecepatan peningkatan IPM masing-masing provinsi berbeda. Kecepatan peningkatan IPM ini sangat tergantung dari tinggi rendahnya angka IPM yang dicapai. Sebagai ilustrasi, provinsi dengan IPM tinggi cukup sulit untuk meningkatkan angka IPM (*hardcore*). Sebaliknya, lebih mudah bagi provinsi yang masih memiliki IPM tergolong rendah untuk meningkatkan kecepatan peningkatan IPM (*softcore*).

Salah satu provinsi yang masuk ke dalam kelompok *hardcore* adalah DKI Jakarta. Selama empat tahun terakhir DKI Jakarta menduduki peringkat pertama IPM, tetapi memiliki kecepatan peningkatan IPM yang rendah. Pada tahun 2009 reduksi *shortfall* DKI Jakarta relatif rendah sekitar 1,45. Hal ini menggambarkan kecepatan pembangunan di Provinsi DKI sudah semakin melambat karena nilai komponen-komponen IPM di DKI Jakarta sudah relatif tinggi sehingga sulit untuk ditingkatkan lagi.

Sedangkan untuk kelompok *softcore*, kecepatan peningkatan IPM-nya relatif lebih mudah. Salah satu provinsi yang masuk kelompok ini adalah Papua

Barat. Capaian IPM Provinsi Papua Barat adalah 68,58 dan reduksi *shortfall*-nya relatif tinggi mencapai 1,95.

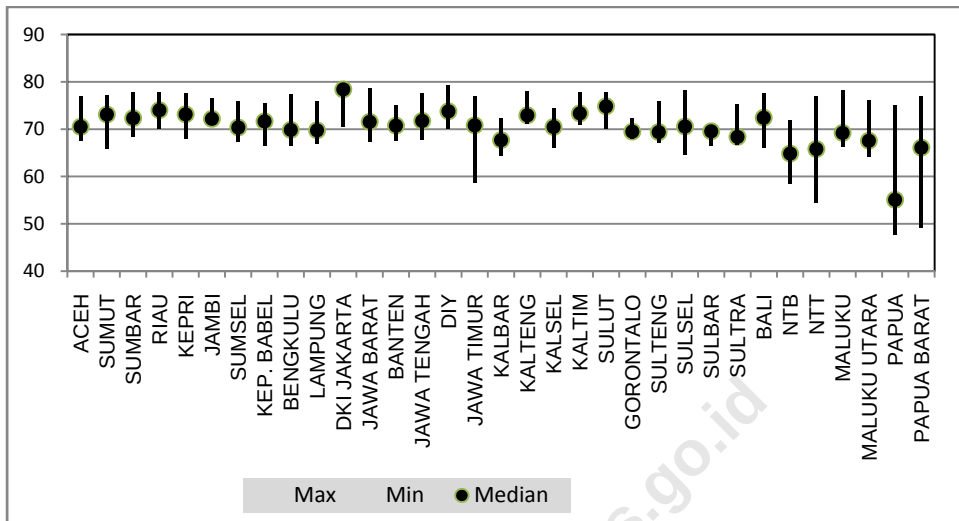
Gambar 4.5 Reduksi *Shortfall* dan IPM Provinsi, 2009



Sumber : BPS

Namun demikian, ada beberapa pengecualian dimana provinsi dengan IPM tinggi masih mampu memiliki kecepatan pembangunan yang tinggi atau sebaliknya provinsi dengan IPM rendah memiliki kecepatan pembangunan yang rendah. Sebagai contoh, provinsi Kalimantan Timur yang meskipun capaian IPM-nya sudah cukup tinggi tetapi reduksi *shortfall*-nya justru tertinggi ke-2 diantara provinsi-provinsi lainnya, yaitu sebesar 2,32. Jika dilihat lebih dalam, kecepatan pembangunan di provinsi tersebut lebih dipengaruhi oleh tingginya kenaikan daya beli. Sementara itu, Provinsi Papua, yang meskipun capaian IPM paling rendah, tetapi reduksi *shortfall*-nya juga relatif rendah, yaitu sebesar 1,49. Hal ini menggambarkan bahwa capaian dan kecepatan pembangunan di Papua relatif lebih lambat dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Gambar 4.6 Kisaran IPM Tingkat Provinsi, 2009



Sumber : BPS

Dari Gambar 4.6 terlihat bahwa hampir semua provinsi memiliki sebaran IPM kabupaten/kota yang relatif seragam. Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi yang sebarannya relatif paling homogen dibandingkan provinsi lain. Di provinsi ini angka IPM tertinggi sebesar 70,83 terjadi di Kabupaten Majene sedangkan IPM terendah terjadi di Kabupaten Polewali Mamasa yaitu sebesar 66,61. Hal ini menunjukkan pembangunan manusia yang relatif seragam di provinsi sendiri.

Sementara itu ada beberapa provinsi yang memiliki sebaran yang beragam seperti di Provinsi Papua. Di provinsi ini angka IPM tertinggi kabupaten/kota sebesar 75,16 (Kota Jayapura) sedangkan IPM terendah sebesar 47,74 (Kabupaten Nduga). Hal ini menunjukkan pembangunan manusia di Papua tidak merata dengan kata lain terjadi disparitas pembangunan manusia antarkabupaten/kota di provinsi ini. Provinsi lain yang memiliki sebaran beragam adalah Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Maluku dan Sulawesi Selatan.

Perkembangan pencapaian IPM dapat dilihat melalui reduksi *shortfall* yang pada tahun 2009 relatif mengalami penurunan dibanding tahun 2008. Pada tahun 2008 reduksi *shortfall* tertinggi mencapai 2,87 poin yang dicapai oleh Kalimantan Timur. Sedangkan tahun 2009 reduksi *shortfall* tertinggi turun sebesar 0,48 poin yaitu hanya mencapai 2,39 poin yang dicapai oleh Sulawesi

Selatan sedangkan Kalimantan Timur menduduki peringkat kedua untuk reduksi *shortfall* yang hanya mencapai 2,32 poin.

Tabel 4.1 Provinsi dengan Reduksi *Shortfall* Tinggi, 2008-2009

Provinsi	IPM		Reduksi <i>Shortfall</i> 2008-2009
	2008	2009	
(1)	(2)	(3)	(4)
SULAWESI SELATAN	70,22	70,94	2,39
KALIMANTAN TIMUR	74,52	75,11	2,32
JAWA TIMUR	70,38	71,06	2,29
LAMPUNG	70,30	70,93	2,12
SULAWESI UTARA	75,16	75,68	2,07

Sumber : BPS

Tabel 4.1 memperlihatkan 5 provinsi yang mencatat kemajuan pesat selama tahun 2008-2009. Dari kelima provinsi tersebut umumnya berasal dari wilayah bagian barat dan memiliki IPM yang cukup tinggi. Provinsi tersebut adalah Kalimantan Timur (75,11), Jawa Timur (71,06) dan Lampung (70,93). Sedangkan 2 provinsi lainnya berasal dari wilayah Indonesia timur yaitu Sulawesi Selatan (70,94) dan Sulawesi Utara (75,68). Hal ini berarti meskipun telah mencapai IPM yang cukup tinggi kelima provinsi tersebut berhasil memaksimalkan pencapaian IPM-nya pada tahun 2009, sehingga reduksi *shortfall* yang dicapai cukup tinggi.

Tabel 4.2 Provinsi dengan Reduksi *Shortfall* Rendah, 2008-2009

Provinsi	IPM		Reduksi <i>Shortfall</i> 2008-2009
	2008	2009	
(1)	(2)	(3)	(4)
BANTEN	69,70	70,06	1,19
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	72,19	72,55	1,30
NUSA TENGGARA TIMUR	66,15	66,60	1,32
DI YOGYAKARTA	74,88	75,23	1,39
KEPULAUAN RIAU	74,18	74,54	1,42

Sumber : BPS

Disisi lain 5 provinsi yang memiliki reduksi *shortfall* rendah umumnya juga berasal dari wilayah barat kecuali Nusa Tenggara Timur. Provinsi tersebut adalah Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan

Bangka Belitung dan Banten. Dari kelima provinsi tersebut hanya Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki IPM kurang dari 70 poin. Hal ini berarti bahwa meskipun capaian IPM masih relatif rendah, perkembangan capaian IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur juga masih kecil.

4.1.2 Capaian IPM Kabupaten/Kota

IPM kabupaten/kota juga memperlihatkan suatu peningkatan selama periode 2008-2009. Tingkat kecepatan peningkatan IPM antarkabupaten/kota pada umumnya berbeda. Beberapa kabupaten/kota mencapai peningkatan IPM cukup pesat dan ada pula beberapa kabupaten/kota dengan tingkat kecepatan yang cukup lambat.

Seperti halnya pencapaian IPM provinsi, perkembangan pencapaian IPM kabupaten/kota juga mengalami peningkatan. IPM tertinggi kabupaten/kota tahun 2009 mencapai 79,29. Angka ini naik sebesar 0,29 poin dari tahun 2008. Angka IPM kabupaten/kota terendah juga mengalami kenaikan sebesar 0,24 poin dari 47,50 di tahun 2008 menjadi 47,74 di tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota terus berkembang ke tingkat yang lebih baik meskipun setiap kabupaten/kota memiliki perbedaan perubahan dalam pencapaian IPM.

Tabel 4.3 Kabupaten/Kota dengan IPM Tertinggi, 2008-2009

Tahun 2008 Kabupaten/Kota Tertinggi	IPM	Tahun 2009 Kabupaten/Kota Tertinggi	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Jakarta Selatan	79,00	Kota Yogyakarta	79,29
Kota Yogyakarta	78,95	Kota Jakarta Selatan	79,26
Kota Jakarta Timur	78,54	Kota Depok	78,77
Kota Jakarta Barat	78,37	Kota Jakarta Timur	78,74
Kota Depok	78,36	Kota Jakarta Barat	78,63

Sumber : BPS

Tabel 4.4 Kabupaten/Kota dengan IPM Terendah, 2008-2009

Tahun 2008 Kabupaten/Kota Terendah	IPM	Tahun 2009 Kabupaten/Kota Terendah	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)
Lanny Jaya	48,12	Mamberamo Tengah	48,18
Pegunungan Bintang	47,94	Yalimo	48,16
Memberamo Tengah	47,90	Deiyai	48,02
Yalimo	47,75	Intan Jaya	47,94
Nduga	47,45	Nduga	47,74

Sumber : BPS

Kecepatan pencapaian IPM kabupaten/kota yang bervariasi selama tahun 2008-2009 menyebabkan pergeseran urutan peringkat IPM untuk kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang menduduki lima IPM tertinggi tahun 2008 mampu mempertahankan posisinya di tahun 2009. Urutan pertama diraih oleh Kota Yogyakarta, disusul oleh Kota Jakarta Selatan, Kota Depok, Kota Jakarta Timur dan Kota Jakarta Barat. Sedangkan untuk urutan lima kabupaten/kota terendah terlihat mengalami perubahan posisi yang umumnya disebabkan oleh pembentukan kabupaten baru. Kelima kabupaten/kota dengan IPM tahun 2009 terendah adalah Mamberamo Tengah, Yalimo, Deiyai, Intan Jaya dan Nduga yang kesemuanya berada di Provinsi Papua. Sedangkan kelima kabupaten/kota tertinggi semuanya berasal dari Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan adanya disparitas pembangunan dimana pembangunan di ujung timur Indonesia (Papua) masih tertinggal jauh dibanding provinsi lainnya.

Perkembangan pencapaian IPM kabupaten/kota selama tahun 2008-2009 bervariasi. Tabel 4.5 menyajikan 10 kabupaten/kota yang mencatat kemajuan pesat selama tahun 2008-2009. Kota Bau-bau menduduki posisi pertama yang mencatat kemajuan pesat dengan reduksi *shortfall* 2,61. Posisi selanjutnya diisi oleh Pinrang, Barru, Kota Balikpapan, Pangkajene Kepulauan, Pasuruan, Sampang, Maluku Tenggara, Kota Banjarmasin dan posisi kesepuluh Bone Bolango. Dari kesepuluh kabupaten/kota tersebut 5 diantaranya berada di Pulau Sulawesi, 2 di Kalimantan, 1 di Maluku dan 2 di Pulau Jawa. Sedangkan sepuluh kabupaten dengan reduksi *shortfall* terendah yaitu Kota Cilegon, Lamandau, Aceh Singkil, Mamberamo Tengah, Nduga, Puncak, Mappi, Kota Palangkaraya, Gunung Kidul, Muara Jambi. Kota Cilegon yang memiliki reduksi *shortfall* terendah berada di Pulau Jawa (Provinsi Banten). Jika dilihat lebih mendalam,

DISPARITAS ANTARWILAYAH

kabupaten/kota dengan reduksi *shortfall* rendah yang berada di Pulau Papua, memiliki IPM yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah Timur masih rendah serta perkembangannya pun lambat dibanding pulau-pulau lain.

Tabel 4.5 Sepuluh Kabupaten/Kota yang Menghasilkan Reduksi *Shortfall* Terbesar, 2008-2009

Provinsi	Kabupaten/Kota	IPM	Reduksi <i>Shortfall</i> 2008-2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Sulawesi Tenggara	Kota Bau-Bau	72,87	2,61
Sulawesi Selatan	Pinrang	72,61	2,49
Sulawesi Selatan	Barru	70,30	2,48
Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	77,86	2,43
Sulawesi Selatan	Pangkajene Kepulauan	69,07	2,43
Jawa Timur	Pasuruan	66,84	2,42
Jawa Timur	Sampang	58,68	2,39
Maluku	Maluku Tenggara	72,13	2,38
Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	73,49	2,37
Gorontalo	Bone Bolango	71,19	2,36

Sumber : BPS

Tabel 4.6 Sepuluh Kabupaten/Kota yang Menghasilkan Reduksi *Shortfall* Terendah, 2008-2009

Provinsi	Kabupaten/Kota	IPM	Reduksi <i>Shortfall</i> 2008-2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Banten	Kota Cilegon	74,99	0,21
Kalimantan Tengah	Lamandau	72,08	0,36
Aceh	Aceh Singkil	68,29	0,52
Papua	Mamberamo Tengah	48,18	0,54
Papua	Nduga	47,74	0,54
Papua	Puncak	48,71	0,56
Papua	Mappi	49,88	0,57
Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya	78,02	0,57
DI Yogyakarta	Gunung Kidul	70,18	0,58
Jambi	Muara Jambi	72,18	0,67

Sumber : BPS

4.2. Status Pembangunan

Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu kategori tinggi ($IPM \geq 80$), kategori menengah atas ($66 \leq IPM < 80$), kategori menengah bawah ($50 \leq IPM < 66$) dan kategori rendah ($IPM < 50$).

Jika diukur menurut skala internasional, hampir semua provinsi di Indonesia termasuk dalam kategori IPM menengah atas selama tahun 2008-2009, dimana 31 dari 33 provinsi masuk dalam kelompok ini. Dibandingkan dengan IPM provinsi tahun 2008, komposisi IPM tahun 2009 tidak mengalami perubahan.

Tabel 4.7 Status Pembangunan Provinsi, 2008-2009

Status Pembangunan	Provinsi	
	2008	2009
(1)	(2)	(3)
Rendah	-	-
Menengah Bawah	2	2
Menengah Atas	31	31
Tinggi	-	-
Jumlah	33	33

Sumber : BPS

Pembangunan manusia di semua kabupaten/kota di Indonesia mengalami kemajuan. Namun demikian, kemajuan pembangunan manusia antarkabupaten/kota satu dengan kabupaten/kota lainnya sangat bervariasi. Kemajuan ini sangat tergantung dari komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

Sementara itu, berdasarkan skala internasional untuk IPM perkabupaten/kota terdapat perubahan yang cukup menggembirakan dimana semakin banyak daerah yang masuk ke dalam kelompok menengah atas. Jika pada tahun 2008 sebanyak 425 kabupaten/kota termasuk ke dalam kelompok IPM menengah atas, maka pada tahun 2009 bertambah menjadi 441 kabupaten/kota. Selain itu, jumlah kabupaten/kota yang masuk kategori IPM menengah ke bawah menjadi berkurang, dari sebanyak 48 pada tahun 2008 menjadi 43 pada tahun 2009. Namun, kabupaten/kota yang masuk dalam

kategori rendah pada tahun 2008 meningkat dari 10 kabupaten/kota menjadi 13 kabupaten/kota pada tahun 2009. Pertambahan jumlah kabupaten/kota pada kategori IPM rendah tersebut lebih disebabkan karena bertambahnya kabupaten/kota baru hasil pemekaran wilayah di wilayah Indonesia timur yang pembangunan manusianya lebih rendah dibanding daerah lain.

Tabel 4.8 Status Pembangunan Kabupaten/Kota, 2008-2009

Status Pembangunan	Kabupaten/Kota	
	2008	2009
(1)	(2)	(3)
Rendah	10	13
Menengah Bawah	48	43
Menengah Atas	425	441
Tinggi	-	-
Jumlah	483	497

Sumber : BPS

4.3 Disparitas Pembangunan Manusia

Pencapaian pembangunan manusia antarprovinsi yang bervariasi memberikan gambaran adanya ketidakmerataan perkembangan pembangunan di berbagai sektor. Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan berbagai indikator sosial dan ekonomi. Indikator sosial dan ekonomi yang terangkum dalam IPM merupakan salah satu ukuran pencapaian pembangunan.

Berdasarkan skala internasional, pencapaian pembangunan manusia tahun 2009 di tingkat provinsi dengan kategori IPM menengah atas sebesar 93,94 persen atau sebanyak 31 provinsi (21 provinsi di wilayah barat dan 10 provinsi di wilayah timur). Sedangkan sisanya 6,06 persen (2 provinsi) menduduki posisi menengah bawah yang semuanya ada di wilayah timur Indonesia yaitu Nusa Tenggara Barat dan Papua. Hal tersebut memberikan gambaran adanya kesenjangan pencapaian pembangunan manusia di wilayah Indonesia barat dan wilayah Indonesia timur.

Peningkatan pembangunan manusia terus diupayakan oleh semua provinsi di Indonesia baik wilayah barat maupun wilayah timur. Namun demikian, peningkatan pembangunan manusia di wilayah bagian timur masih relatif lambat dibandingkan pembangunan di wilayah bagian barat. Untuk itu, diperlukan komitmen pemerintah daerah di wilayah Indonesia timur dalam meningkatkan

kapasitas dasar penduduk untuk mempercepat peningkatan IPM dalam mengejar ketertinggalannya dengan wilayah Indonesia barat. Dengan demikian, kesenjangan antara wilayah Indonesia barat dengan wilayah Indonesia timur dapat dikurangi.

Pembangunan manusia di kabupaten/kota di wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur tahun 2009 juga masih menunjukkan ketimpangan. Hal ini ditunjukkan dengan disparitas pencapaian IPM yang relatif masih besar. Di tingkat kabupaten/kota, pencapaian IPM tertinggi adalah Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 79,29. Sedangkan pencapaian IPM terendah adalah Kabupaten Nduga di Provinsi Papua sebesar 47,74 sehingga disparitas pembangunan manusia antara Kota Jakarta Selatan (wilayah barat) dan Kabupaten Nduga (wilayah timur) sekitar 31,55 poin. Nilai disparitas ini sama dengan disparitas pencapaian IPM tahun 2008.

Tabel 4.9 Perbedaan Kemajuan Pembangunan Manusia antara Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur, 2009

Wilayah Barat	IPM	Wilayah Timur	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)
Tertinggi		Tertinggi	
Kota Yogyakarta	79,29	Kota Ambon	78,25
Kota Jakarta Selatan	79,26	Kota Makasar	78,24
Kota Depok	78,77	Manado	77,79
Kota Jakarta Timur	78,74	Kota Pare Pare	77,45
Kota Jakarta Barat	78,63	Kota Kupang	76,94
Terendah		Terendah	
Pamekasan	63,81	Mamberamo	48,18
Situbondo	63,69	Yalimo	48,16
Probolinggo	62,13	Deiyai	48,02
Bondowoso	62,11	Intan Jaya	47,94
Sampang	58,68	Nduga	47,74

Sumber : BPS

Tabel 4.9 memperlihatkan perbedaan kemajuan pembangunan manusia antara wilayah Indonesia bagian barat dan bagian timur tahun 2009. Di wilayah bagian barat pencapaian IPM tertinggi maupun terendah didominasi oleh kabupaten/kota di pulau Jawa. Urutan tertinggi di tempati oleh Kota Yogyakarta dengan IPM sebesar 79,29, selanjutnya Kota Jakarta Selatan, kota Depok, kota

DISPARITAS ANTARWILAYAH

Jakarta Timur dan Kota Jakarta Barat yang masing-masing mencapai IPM 79,26, 78,77, 78,74 dan 78,63. Sedangkan di wilayah timur, urutan pertama di tempati oleh Kota Ambon dengan IPM sebesar 78,25 disusul oleh Kota Makasar dengan IPM 78,24, Manado dengan IPM 77,79, kota Pare-pare dengan IPM 77,45 dan kota Kupang dengan IPM 76,94.

Urutan lima terendah di wilayah bagian barat Indonesia adalah Pamekasan (63,81), Situbondo (63,69), Probolinggo (62,13), Bondowoso (62,11) dan Sampang (58,68). Kelima kabupaten/kota ini terletak di provinsi Jawa Timur yaitu di wilayah tapal kuda. Rendahnya IPM khususnya di wilayah tapal kuda terkait dengan budaya masyarakat setempat. Sementara itu, di wilayah Indonesia bagian timur lima kabupaten/kota dengan urutan IPM terendah semuanya terdapat di provinsi Papua (Tabel 4.9).

Ketimpangan pembangunan manusia antarkabupaten/kota juga dapat dilihat dari status pembangunannya. Pembangunan manusia antarkabupaten/kota di wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur masih terdapat adanya ketimpangan. Pembangunan manusia di kabupaten/kota di wilayah bagian barat terlihat relatif lebih maju dibanding wilayah bagian timur. Di wilayah Indonesia bagian barat, 96,70 persen (322 kabupaten/kota) dari seluruh kabupaten yang ada di wilayah ini memiliki status pembangunan dengan kategori IPM menengah atas ($66 \leq \text{IPM} \leq 80$) dan 3,30 (11 kabupaten/kota) masuk kedalam kategori menengah bawah. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur, Dari seluruh kabupaten/kota yang ada yang memiliki status pembangunan dengan IPM kategori menengah atas sebesar 72,56 persen (119 kabupaten/kota) dan kategori IPM menengah bawah sebesar 19,51 (32 kabupaten/kota). Selain itu, ternyata masih terdapat 7,93 persen (13 kabupaten/kota) di wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki status pembangunan dengan kategori IPM rendah.

KETERKAITAN KOMPONEN IPM DENGAN VARIABEL SOSIAL EKONOMI

5

KETERKAITAN KOMPONEN IPM DENGAN VARIABEL SOSIAL EKONOMI

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat), dan peningkatan pendidikan (kemampuan baca tulis dan kemampuan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang menggambarkan pencapaian di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang digambarkan melalui komponen angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan *purchasing power parity*. Nilai IPM sangat dipengaruhi oleh berbagai indikator sosial ekonomi. Untuk mengetahui variabel apa saja yang berpengaruh terhadap perubahan nilai IPM, maka akan dibuat suatu model regresi panel untuk keempat komponen IPM dengan persamaan umumnya sebagai berikut:

$$\text{Komponen}_{it} = C_0 + C_1 X_{1it} + C_2 X_{2it} + \dots + C_n X_{nit} + \varepsilon_{it}$$

dimana:

C_0 : *intercept*

$C_1, C_2, \dots, C_n$: nilai parameter dari masing-masing variabel bebas

$X_{1it}, X_{2it}, \dots, X_{nit}$: variabel bebas provinsi ke-i pada tahun t

Pada setiap persamaan akan diperoleh nilai *Adjusted R-squared* yang menggambarkan seberapa besar variabel-variabel bebas mampu menjelaskan keragaman nilai dari variabel tak bebasnya. Kemudian tanda pada koefisien masing-masing variabel bebas menggambarkan arah hubungan dengan variabel tak bebas. Jika koefisiennya bernilai positif berarti kenaikan nilai variabel bebas akan menyebabkan kenaikan pada variabel tak bebas. Sebaliknya, jika koefisiennya bernilai negatif berarti kenaikan variabel bebas justru menyebabkan penurunan pada variabel tak bebasnya. Variabel-variabel yang digunakan pada model regresi panel komponen IPM yaitu:

Mis = Persentase penduduk miskin

Ras = Rasio murid-guru SMP

MysKrt = Rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga

PDRBp = PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2000 dengan migas

Kons = Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita atas dasar harga konstan 2000

KETERKAITAN KOMPONEN IPM DENGAN VARIABEL SOSIAL EKONOMI

Gini	=	Gini Rasio
TPT	=	Tingkat Pengangguran Terbuka
Medis	=	Persentase penolong kelahiran pertama oleh tenaga medis.
Minum	=	Persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih
Dok	=	Rasio dokter per 10.000 penduduk

5.1 Indikator Kesehatan

Tujuan dari pembangunan manusia di bidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang yang sehat. Dengan kualitas kesehatan yang baik maka manusia mampu mengoptimalkan kemampuannya untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga mencapai kehidupan yang layak. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan, dan keturunan.

Indikator-indikator yang mencerminkan derajat kesehatan diantaranya angka harapan hidup saat dilahirkan (e_0), angka kematian bayi (AKB), angka kematian kasar, dan status gizi. Dari indikator-indikator tersebut yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia adalah angka harapan hidup saat dilahirkan (e_0). Setelah dikumpulkan berbagai indikator yang diduga akan memengaruhi e_0 , maka didapat persamaan e_0 sebagai berikut:

$$E0_{it} = (63,3177 + C_i) + 0,0556 \text{ Medis}_{it} + 0,0178 \text{ Minum}_{it} + 0,0435 \text{ Dok}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Berdasarkan persamaan di atas terlihat bahwa variabel yang berpengaruh terhadap perubahan nilai e_0 yaitu persentase penolong kelahiran pertama oleh tenaga medis, persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih dan rasio dokter per 10.000 penduduk. Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 98,53 persen berarti bahwa ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan 98,53 persen keragaman nilai e_0 , sementara 1,47 persen sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang belum masuk ke persamaan.

Pada persamaan di atas terlihat bahwa variabel persentase penolong kelahiran pertama oleh tenaga medis, persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih dan rasio dokter per 10.000 penduduk memiliki hubungan yang positif dengan e_0 yang berarti bahwa meningkatnya nilai variabel tersebut akan menyebabkan meningkat pula nilai e_0 . Misalnya jika persentase penolong kelahiran pertama oleh tenaga medis meningkat 1 persen, maka nilai e_0 akan

KETERKAITAN KOMPONEN IPM DENGAN VARIABEL SOSIAL EKONOMI

naik sebesar 0,056 tahun dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Hal ini sangat wajar karena persalinan yang ditolong oleh tenaga medis akan mengurangi risiko terhadap ibu dan bayi yang dilahirkan, seperti terjadinya infeksi, pendarahan yang tidak tertangani, dan sebagainya. Dengan kualitas penolong persalinan yang baik maka kesehatan ibu dan bayi lebih terjamin sehingga angka harapan hidup akan meningkat.

Hal yang sama juga terjadi pada variabel sumber air minum. Dimana terjadi hubungan yang positif dengan angka harapan hidup. Semakin tinggi persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih maka derajat kesehatannya akan semakin baik mengingat sekitar 60 persen tubuh manusia terdiri atas cairan, sehingga air minum merupakan kebutuhan manusia yang sangat vital, maka kualitas air minum menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan seseorang.

Jumlah tenaga kesehatan juga merupakan indikator penting yang menentukan tingkat kesehatan suatu masyarakat. Semakin seimbang proporsi antara tenaga kesehatan dengan penduduk di suatu wilayah maka semakin baik derajat kesehatan penduduk di wilayah tersebut. Dengan jumlah tenaga kesehatan yang memadai, diharapkan mampu menangani para penduduk yang mengalami gangguan kesehatan. Semakin banyak gangguan kesehatan yang tertangani maka akan meningkatkan angka harapan hidup di suatu wilayah.

5.2 Indikator Pendidikan

Kualitas pendidikan sangat menentukan kualitas sebuah negara. Suatu bangsa dengan masyarakat yang berpendidikan akan menjadi bangsa yang besar, mampu menghadapi tantangan perubahan zaman, dan mampu bersaing dengan bangsa lain. Indikator pendidikan merupakan salah satu komponen untuk mengukur kualitas pembangunan manusia. Indikator pendidikan dalam penghitungan IPM diukur melalui angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (MYS). AMH menggambarkan seberapa besar persentase penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis sedangkan MYS menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk untuk mengenyam pendidikan formal. Semakin tinggi AMH dan MYS bisa diartikan bahwa kualitas penduduk suatu negara semakin baik.

5.2.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian di bidang pendidikan dalam penghitungan IPM. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis. Tinggi rendahnya indikator AMH sangat dipengaruhi oleh berbagai indikator sosial ekonomi seperti tingkat kemiskinan, jumlah fasilitas pendidikan, rasio murid dan guru, PDRB per kapita, konsumsi rumah tangga per kapita, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, dan indikator sosial ekonomi lainnya. Setelah dikumpulkan series dari berbagai indikator yang diduga akan memengaruhi angka melek huruf, maka diperoleh persamaan untuk angka melek huruf sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{AMH}_{it} = & (90,9886 + C_i) - 0,1851\text{Mis}_{it} - 0,1431\text{Ras}_{it} + 0,7533\text{MysKrt}_{it} \\ & + 0,000144\text{PDRBp}_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan di atas terlihat bahwa variabel yang berpengaruh terhadap perubahan nilai AMH adalah persentase penduduk miskin, rasio murid-guru SMP, rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga, dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 dengan migas. Nilai *Adjusted R-squared* dari hasil perhitungan sebesar 98,95 persen yang berarti keempat variabel tersebut mampu menjelaskan 98,95 persen keragaman nilai AMH, sementara 1,05 persen sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang belum masuk ke persamaan.

Dari persamaan di atas terlihat bahwa variabel persentase penduduk miskin dan rasio murid-guru SMP mempunyai hubungan yang negatif yang berarti bahwa penurunan pada kedua nilai variabel tersebut dapat menyebabkan peningkatan nilai AMH. Misalnya dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 1 persen dapat meningkatkan nilai AMH sebesar 0,1851 persen dengan asumsi variabel yang lain tidak berubah.

Sedangkan variabel rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga, dan PDRB per kapita ADHK tahun 2000 dengan migas memiliki hubungan yang positif yang berarti bahwa setiap peningkatan nilai variabel-variabel tersebut dapat menyebabkan peningkatan pada nilai AMH. Misalnya jika rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga meningkat 1 tahun maka nilai AMH akan meningkat sebesar 0,73 persen dengan asumsi variabel lain tidak berubah.

5.2.2 Rata-rata Lama Sekolah/ *Mean Years Schooling* (MYS)

Selain AMH, indikator lain yang juga digunakan untuk mengukur pencapaian di bidang pendidikan dalam penghitungan IPM adalah rata-rata lama sekolah (MYS). Indikator MYS dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan; yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Sama halnya dengan AMH, nilai MYS juga sangat dipengaruhi oleh berbagai indikator sosial ekonomi seperti tingkat kemiskinan, jumlah fasilitas pendidikan, rasio murid guru, PDRB per kapita, konsumsi rumah tangga per kapita, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, dan indikator sosial ekonomi lainnya. Setelah dikumpulkan series dari berbagai indikator yang diduga akan memengaruhi rata-rata lama sekolah, maka diperoleh persamaan untuk MYS yaitu:

$$\begin{aligned} \text{MYS}_{it} = & (6,2955 + C_i) - 0,0238\text{Mis}_{it} - 0,036\text{Ras}_{it} + 0,2576\text{MysKrt}_{it} \\ & + 0,000119\text{Kons}_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan di atas terlihat bahwa variabel yang berpengaruh terhadap perubahan nilai MYS adalah persentase penduduk miskin, rasio murid-guru SMP, rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita ADHK 2000. Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 97,76 persen yang berarti keempat variabel tersebut mampu menjelaskan 97,76 persen keragaman nilai MYS, sementara 2,24 persen sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang belum masuk ke persamaan.

Dari persamaan di atas kita juga dapat melihat bahwa variabel persentase penduduk miskin dan variabel murid-guru SMP memiliki hubungan yang negatif, yang berarti bahwa penurunan nilai persentase penduduk miskin akan mengakibatkan meningkatnya nilai MYS. Misalnya dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 1 persen dapat meningkatkan nilai MYS sebesar 0,0238 tahun dengan asumsi variabel yang lain tidak berubah. Kemudian pada persamaan tersebut terlihat juga bahwa variabel rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita ADHK 2000 memiliki hubungan yang positif dengan MYS, yang berarti peningkatan nilai pada kedua variabel tersebut juga akan meningkatkan nilai MYS. Misalnya jika rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga meningkat 1 tahun maka nilai AMH akan meningkat sebesar 0,2576 tahun dengan asumsi variabel lain tidak berubah.

5.3 Indikator Daya Beli/ *Purchasing Power Parity* (PPP)

Indikator ketiga yang digunakan untuk menghitung IPM adalah daya beli yang disesuaikan (PPP). Indikator ini menggambarkan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya baik makanan maupun nonmakanan sehingga bisa mencapai taraf hidup yang layak. Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan akan sangat dipengaruhi oleh indikator lainnya seperti pendapatan, tingkat pengangguran, pendidikan, dan sebagainya. Persamaan yang diperoleh untuk PPP yaitu:

$$PPP_{it} = (660,521 + C_i) - 1,682Mis_{it} - 29,605Gini_{it} - 1,179TPT_{it} + 1,863Kons_{it} + \varepsilon_{it}$$

Berdasarkan persamaan di atas terlihat bahwa variabel yang berpengaruh terhadap perubahan nilai PPP adalah persentase penduduk miskin, gini rasio, tingkat pengangguran terbuka dan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita ADHK 2000. Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 95,02 persen berarti keempat variabel tersebut mampu menjelaskan 95,02 persen keragaman nilai PPP, sementara 4,98 persen sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang belum masuk ke persamaan.

Variabel yang memiliki hubungan negatif dengan PPP adalah variabel persentase penduduk miskin, gini rasio, dan tingkat pengangguran terbuka yang menandakan bahwa penurunan nilai pada ketiga variabel tersebut akan meningkatkan nilai PPP. Misalnya dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 1 persen dapat meningkatkan nilai PPP sebesar 1,682 dengan asumsi variabel yang lain tidak berubah. Sedangkan variabel yang memiliki hubungan yang positif adalah variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita ADHK 2000 yang menandakan bahwa peningkatan pada variabel tersebut juga akan meningkatkan nilai PPP.

- Hinde, Andrew, 1998. *Demographic Method*, Arnold, London.
- Human Development Report, 1993. New York. USA.
- Human Development Report, 1996. New York. USA.
- Human Development Report, 1997. New York. USA.
- Human Development Report, 2000. New York. USA.
- Human Development Index , 2005. New York. USA.
- H. Preston, Samuel, et.all, 2004. *Demography: Measuring and Modelling Population Processes*, Blackwell, USA.
- Imawan, Wynandin dan Uzair Suhaimi. 1997. *Status dan Perkembangan Upaya Pembangunan Manusia di Indonesia: Perbandingan Antar Propinsi*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Meneg PP dan BPS. 2008. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2007*. Jakarta.
- Ritonga, Razali, 2006. *Indeks Pembangunan Manusia*. Kompas 20 Desember 2006. Opini halaman 4.
- Siegel, Jacob, 2002. *Applied Demographic*, Academic Press, USA.
- UNDP, BPS dan Bappenas 2001. *Laporan Pembangunan Manusia 2001:Demokrasi dan pembangunan manusia di Indonesia*, BPS–Indonesia.
- UNDP, BPS dan Bappenas 2004. *Laporan Pembangunan Manusia 2004:Ekonomi dari demokrasi: Membiayai Pembangunan Manusia Indonesia*, BPS–Indonesia.

TIM PENULIS

Pengarah : Suhariyanto

Editor : Nina Suri Sulistini
Harmawanti Marhaeni

Penulis : Fenti Anggraeni
Martin Muktiasih

Pengolah Data : Ari Shobri Bukhari
Fenti Anggraeni
Henri Asri Reagan

Perapihan Naskah : Henri Asri Reagan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

<https://www.bps.go.id>

Lampiran 1. IPM dan Komponen, 2008-2009

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan (ribu rupiah ppp)		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1100	Aceh	68.50	68.60	96.20	96.39	8.50	8.63	605.56	610.27	70.76	71.31	17	17	1.90
1101	Simeulue	62.84	62.91	98.30	98.58	8.00	8.30	617.07	617.10	68.60	68.92	338	347	1.04
1102	Aceh Singkil	64.46	64.69	96.20	96.22	7.70	7.74	608.18	608.22	68.12	68.29	353	373	0.52
1103	Aceh Selatan	66.71	66.82	96.42	96.47	8.20	8.28	600.21	604.59	69.18	69.64	306	310	1.51
1104	Aceh Tenggara	69.16	69.19	96.94	97.10	9.30	9.34	594.03	596.01	70.99	71.23	211	224	0.81
1105	Aceh Timur	69.52	69.63	97.35	97.51	8.40	8.49	580.16	586.29	69.55	70.19	289	282	2.09
1106	Aceh Tengah	69.42	69.53	98.08	98.13	9.29	9.44	612.61	615.51	72.81	73.22	130	128	1.50
1107	Aceh Barat	69.78	69.87	94.06	94.08	8.20	8.23	591.18	598.72	69.66	70.32	281	273	2.16
1108	Aceh Besar	70.52	70.64	96.93	96.95	9.48	9.51	606.50	608.63	72.84	73.10	129	138	0.94
1109	Pidie	69.11	69.32	95.51	95.56	8.60	8.65	608.11	611.05	71.21	71.60	202	208	1.36
1110	Bireuen	72.28	72.32	98.34	98.37	9.20	9.23	589.40	592.06	72.60	72.86	138	148	0.93
1111	Aceh Utara	69.52	69.63	96.04	96.42	9.10	9.12	602.19	605.69	71.47	71.90	192	194	1.50
1112	Aceh Barat Daya	66.49	66.74	96.22	96.25	7.50	7.63	611.73	614.26	69.38	69.81	299	305	1.41
1113	Gayo Lues	66.84	66.96	86.70	86.97	8.70	8.71	596.44	600.15	67.17	67.59	392	401	1.28
1114	Aceh Tamiang	68.18	68.27	98.00	98.25	8.40	8.77	591.29	595.40	69.81	70.50	267	257	2.31
1115	Nagan Raya	69.42	69.53	89.70	89.78	7.32	7.34	599.28	601.67	68.47	68.74	342	353	0.88
1116	Aceh Jaya	67.91	67.97	93.73	93.78	8.70	8.71	591.47	596.69	68.94	69.39	318	329	1.46
1117	Bener Meriah	67.41	67.52	97.19	97.45	8.49	8.53	597.84	603.78	69.77	70.38	272	268	2.01
1118	Pidie Jaya	69.02	69.13	94.20	94.23	8.00	8.38	618.56	620.18	71.23	71.71	201	201	1.66
1171	Kota Banda Aceh	70.24	70.56	99.03	99.10	11.86	11.91	630.25	630.63	76.74	77.00	25	25	1.10
1172	Kota Sabang	70.36	70.69	98.78	98.81	10.23	10.36	623.14	625.82	75.00	75.49	62	59	1.97
1173	Kota Langsa	70.14	70.36	98.75	99.10	9.88	10.04	599.51	600.66	72.79	73.20	133	132	1.51
1174	Kota Lhokseumawe	70.00	70.41	98.82	99.22	9.70	9.91	630.77	631.63	75.00	75.54	61	58	2.16
1175	Subulussalam	65.54	65.71	96.50	96.53	7.50	7.58	605.35	608.74	68.42	68.85	343	351	1.34

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 1

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan (ribu rupiah ppp)		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1200	SUMATERA UTARA	69.20	69.35	97.08	97.15	8.60	8.65	629.97	634.73	73.29	73.80	8	8	1.89
1201	Nias	69.15	69.38	89.45	89.75	6.40	6.41	598.85	605.61	67.55	68.26	383	375	2.21
1202	Mandailing Natal	63.46	63.54	99.31	99.32	7.70	7.71	629.74	633.72	69.92	70.27	261	277	1.19
1203	Tapanuli Selatan	66.99	67.03	99.76	99.79	8.90	8.93	635.81	639.12	73.33	73.64	107	113	1.16
1204	Tapanuli Tengah	67.71	67.91	95.74	95.75	8.10	8.12	612.93	616.80	70.48	70.91	236	238	1.45
1205	Tapanuli Utara	68.95	69.32	98.55	98.57	8.80	8.82	628.68	629.88	73.53	73.85	94	103	1.21
1206	Toba Samosir	70.54	70.61	98.15	98.34	9.70	9.74	638.57	643.12	75.75	76.22	44	40	1.91
1207	Labuhan Batu	68.66	69.20	97.92	97.94	8.30	8.32	631.57	634.24	73.08	73.61	117	116	1.94
1208	Asahan	68.69	68.84	96.68	96.79	7.37	7.67	624.23	627.64	71.57	72.16	188	184	2.07
1209	Simalungun	68.73	68.85	97.31	97.37	8.60	8.69	622.20	628.59	72.49	73.13	145	135	2.32
1210	Dairi	67.90	68.15	97.81	97.95	8.33	8.53	623.18	623.85	72.01	72.38	166	170	1.31
1211	Karo	71.99	72.09	98.59	98.69	8.90	9.09	617.30	619.83	74.43	74.84	75	77	1.62
1212	Deli Serdang	70.07	70.36	98.18	98.35	9.09	9.11	629.69	630.84	74.36	74.67	78	84	1.19
1213	Langkat	68.99	69.03	96.81	96.85	8.70	8.72	617.56	624.51	72.24	72.82	149	149	2.10
1214	Nias Selatan	69.20	69.60	84.80	85.19	6.30	6.32	587.42	592.13	65.59	66.27	433	435	2.00
1215	Humbang Hasundutan	67.69	67.78	98.20	98.21	8.74	9.05	609.62	611.20	71.24	71.64	200	204	1.40
1216	Pakpak Barat	67.05	67.32	96.50	96.51	8.10	8.14	608.63	611.52	69.95	70.36	259	271	1.35
1217	Samosir	69.52	69.62	96.60	96.61	9.50	9.51	619.65	621.09	73.24	73.42	112	122	0.68
1218	Serdang Bedagai	68.79	68.89	97.39	97.44	8.60	8.63	622.90	626.30	72.59	72.94	140	142	1.27
1219	Batu Bara	68.34	68.46	95.20	95.21	7.24	7.33	624.64	626.30	70.98	71.25	212	222	0.92
1220	Padang Lawas Utara	66.48	66.53	99.01	99.21	7.99	8.16	631.11	632.03	71.85	72.11	176	188	0.94
1221	Padang Lawas	66.90	66.97	99.64	99.65	7.72	8.12	619.75	622.29	71.15	71.68	204	202	1.84
1222	Labuhan Batu Selatan	69.28	69.62	98.81	98.82	7.97	8.18	628.66	628.88	73.16	73.52	115	119	1.34
1223	Labuhan Batu Utara	68.82	69.22	98.15	98.16	7.80	7.81	630.79	631.74	72.80	73.10	132	137	1.11
1224	Nias Utara	-	69.06	-	89.19	-	5.81	-	603.54	-	67.36	-	408	-
1225	Nias Barat	-	69.07	-	84.30	-	5.36	-	603.74	-	65.96	-	443	-
1271	Kota Sibolga	70.11	70.17	99.20	99.29	9.61	9.63	621.67	626.42	74.39	74.82	77	79	1.68
1272	Kota Tanjung Balai	69.66	70.05	98.97	98.98	8.60	8.80	620.68	620.92	73.26	73.64	111	114	1.44
1273	Kota Pematang Siantar	71.83	72.00	99.39	99.41	10.80	10.81	630.64	632.28	76.95	77.18	22	23	0.99
1274	Kota Tebing Tinggi	71.07	71.20	98.53	98.61	9.80	9.81	631.85	635.94	75.69	76.10	47	45	1.69

Lanjutan Lampiran 1

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan (ribu rupiah ppp)		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1275	Kota Medan	71.50	71.71	99.29	99.31	10.70	10.80	631.05	632.32	76.70	76.99	26	26	1.24
1276	Kota Binjai	71.54	71.65	99.17	99.18	9.84	9.85	628.70	630.45	75.88	76.09	41	48	0.86
1277	Kota Padang Sidempuan	69.35	69.47	99.60	99.62	9.80	10.10	622.58	625.45	74.26	74.77	83	80	2.01
1278	Gunung Sitoli	-	69.55	-	94.75	-	8.42	-	610.39	-	71.33	-	219	-
1300	SUMATERA BARAT	69.00	69.25	96.66	96.81	8.26	8.45	631.52	633.72	72.96	73.44	9	9	1.78
1301	Kepulauan Mentawai	68.28	68.36	92.37	92.44	6.50	6.51	601.23	606.23	67.97	68.42	360	365	1.43
1302	Pesisir Selatan	66.75	67.03	92.83	93.32	7.53	7.84	628.40	628.93	70.07	70.61	253	251	1.78
1303	Solok	65.90	66.25	97.10	97.11	7.30	7.54	621.05	623.85	69.81	70.41	266	266	1.96
1304	Sawah Lunto/Sijunjung	66.25	66.58	93.07	93.42	7.20	7.43	630.49	632.74	69.77	70.37	271	270	2.00
1305	Tanah Datar	70.22	70.58	96.63	96.64	7.80	8.23	627.58	628.06	72.98	73.54	119	118	2.05
1306	Padang Pariaman	67.92	68.28	94.45	94.47	7.13	7.25	626.29	629.28	70.63	71.15	228	228	1.77
1307	Agam	68.67	68.85	97.82	97.84	8.20	8.27	625.22	628.31	72.50	72.90	144	145	1.44
1308	Limapuluh Koto	67.72	68.08	98.70	98.71	7.70	7.80	607.97	608.70	70.47	70.80	238	246	1.13
1309	Pasaman	66.76	67.10	98.36	98.40	7.57	7.58	633.12	638.48	71.71	72.32	186	175	2.17
1310	Solok Selatan	64.35	64.48	97.24	97.38	7.57	7.76	606.35	611.11	68.06	68.67	354	356	1.90
1311	Dharmas Raya	65.50	65.75	95.54	95.83	7.37	7.66	604.04	606.62	67.99	68.60	359	358	1.92
1312	Pasaman Barat	64.62	64.88	97.83	98.18	7.90	7.98	616.14	619.52	69.33	69.87	302	302	1.76
1371	Kota Padang	70.39	70.64	99.48	99.49	10.80	10.89	643.92	644.31	77.20	77.43	16	19	1.05
1372	Kota Solok	69.34	69.51	98.50	98.51	9.80	10.29	631.99	632.50	74.73	75.23	68	66	1.97
1373	Kota Sawah Lunto	71.22	71.44	98.43	98.50	8.77	9.13	622.71	623.01	74.29	74.71	81	81	1.63
1374	Kota Padang Panjang	70.60	70.95	99.28	99.29	10.20	10.22	645.38	645.60	76.93	77.16	23	24	0.98
1375	Kota Bukit Tinggi	71.22	71.37	99.49	99.55	10.43	10.47	646.58	648.49	77.59	77.86	10	11	1.22
1376	Kota Payakumbuh	70.31	70.46	99.16	99.17	9.07	9.46	633.02	633.52	74.95	75.37	63	62	1.67
1377	Kota Pariaman	68.56	68.79	98.24	98.36	9.33	9.73	625.98	628.14	73.43	74.05	100	94	2.33
1400	RIAU	71.10	71.25	97.81	98.11	8.51	8.56	638.31	642.55	75.09	75.60	3	3	2.06
1401	Kuantan Singingi	68.11	68.22	97.80	97.81	7.80	7.81	638.90	643.52	72.95	73.38	122	124	1.59
1402	Indragiri Hulu	68.60	68.71	97.67	97.76	7.72	7.96	642.79	645.47	73.43	73.89	98	101	1.72

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 1

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan (ribu rupiah ppp)		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1403	Indragiri Hilir	70.89	71.14	98.52	98.79	7.60	7.62	637.73	641.97	74.41	74.95	76	74	2.10
1404	Pelalawan	68.56	68.69	97.60	98.44	7.93	7.95	623.66	628.19	72.07	72.69	161	153	2.21
1405	Siak	71.34	71.52	98.21	98.49	8.80	9.03	639.78	640.78	75.64	76.05	51	49	1.66
1406	Kampar	68.21	68.36	98.10	98.44	8.44	8.46	640.15	644.34	73.64	74.14	93	93	1.90
1407	Rokan Hulu	67.09	67.13	97.38	97.98	7.50	7.55	636.08	639.42	71.84	72.29	178	178	1.59
1408	Bengkalis	70.13	70.24	97.78	97.79	8.86	8.99	629.49	634.08	74.12	74.64	85	85	2.00
1409	Rokan Hilir	67.04	67.11	97.37	97.80	7.20	7.48	634.96	636.69	71.51	71.98	190	193	1.66
1410	Kepulauan Meranti	-	68.61	-	89.73	-	7.32	-	626.84	-	70.15	-	287	-
1471	Kota Pekanbaru	71.03	71.24	99.77	99.80	11.30	11.32	638.13	640.57	77.54	77.86	11	10	1.46
1473	Kota Dumai	71.02	71.33	99.28	99.30	9.70	9.72	646.88	649.88	76.91	77.33	24	21	1.83
1500	JAMBI	68.80	68.95	96.05	96.06	7.63	7.68	628.25	632.60	71.99	72.45	13	13	1.64
1501	Kerinci	70.56	70.70	97.22	97.23	8.10	8.11	629.91	631.88	73.71	73.94	92	100	0.89
1502	Merangin	67.95	68.17	97.38	97.39	7.45	7.47	624.52	625.72	71.39	71.63	196	206	0.83
1503	Sarolangun	69.12	69.27	93.70	93.82	6.90	7.04	631.59	637.05	71.36	72.00	197	192	2.23
1504	Batanghari	68.73	68.95	97.56	97.57	7.51	7.52	630.33	631.51	72.36	72.59	147	156	0.82
1505	Muara Jambi	69.13	69.19	95.89	95.90	7.53	7.55	627.30	629.04	71.99	72.18	169	183	0.67
1506	Tanjung Jabung Timur	69.71	70.06	92.40	92.42	6.20	6.25	628.06	632.17	70.61	71.17	230	227	1.89
1507	Tanjung Jabung Barat	69.30	69.50	97.90	97.91	7.50	7.52	619.75	625.21	71.93	72.47	172	162	1.94
1508	Tebo	68.86	68.98	94.90	94.91	6.80	6.88	627.26	628.97	71.08	71.34	207	218	0.91
1509	Bungo	66.68	66.97	96.10	96.15	7.59	7.78	626.59	631.31	70.67	71.34	223	217	2.29
1571	Kota Jambi	69.78	69.82	98.76	98.77	10.10	10.11	634.75	638.51	75.47	75.79	53	54	1.31
1572	Kota Sungai Penuh	70.84	70.90	97.22	97.23	9.10	9.18	651.70	653.61	76.29	76.52	32	34	1.01
1600	SUMATERA SELATAN	69.20	69.40	97.05	97.21	7.60	7.66	623.49	628.30	72.05	72.61	12	10	2.01
1601	Ogan Komering Ulu	69.20	69.30	98.07	98.43	7.57	7.71	619.18	621.79	71.92	72.36	173	171	1.56
1602	Ogan Komering Hilir	67.56	67.79	94.75	95.24	6.70	6.73	619.41	621.46	69.64	70.06	283	296	1.37
1603	Muara Enim (Liot)	67.28	67.47	98.80	98.81	7.30	7.35	607.44	611.60	69.91	70.38	262	269	1.54
1604	Lahat	67.56	67.90	97.55	97.59	7.59	7.72	607.32	610.39	69.99	70.53	257	255	1.77

Lanjutan Lampiran 1

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan (ribu rupiah ppp)		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1605	Musi Rawas	64.29	64.44	96.50	96.51	7.00	7.05	597.77	603.49	66.77	67.33	405	409	1.68
1606	Musi Banyuasin	69.33	69.59	96.29	96.54	7.00	7.05	610.91	615.48	70.54	71.13	232	229	2.00
1607	Banyuasin	67.05	67.23	96.08	96.24	7.00	7.01	609.02	612.00	69.08	69.45	308	321	1.20
1608	Ogan Komiring Ulu Selatan	69.24	69.30	97.49	97.80	7.10	7.15	608.79	611.60	70.66	71.02	224	233	1.22
1609	Ogan Komiring Ulu Timur	68.23	68.29	94.63	94.67	6.80	6.87	604.07	609.39	68.88	69.39	322	330	1.62
1610	Ogan Ilir	65.68	65.98	97.32	97.47	7.46	7.52	605.49	608.90	68.67	69.17	335	340	1.61
1611	Empat Lawang	65.28	65.42	97.02	97.28	6.88	6.94	602.06	605.75	67.68	68.15	379	384	1.45
1671	Kota Palembang	70.66	70.90	98.63	98.69	9.90	9.95	630.94	633.02	75.49	75.83	52	53	1.38
1672	Kota Prabumulih	71.10	71.51	98.29	98.66	8.88	9.00	608.80	610.06	73.20	73.69	114	109	1.85
1673	Kota Pagar Alam	69.74	69.95	98.21	98.24	8.42	8.54	609.92	611.18	72.16	72.48	153	161	1.15
1674	Kota Lubuk Linggau	65.39	65.54	98.03	98.33	8.98	9.11	604.26	607.46	69.69	70.18	276	283	1.62
1700	BENGKULU	69.40	69.65	94.87	94.90	8.00	8.23	625.66	626.82	72.14	72.55	11	12	1.46
1701	Bengkulu Selatan	67.10	67.25	95.40	95.43	7.87	8.08	627.52	631.35	71.03	71.57	208	209	1.87
1702	Rejang Lebong	66.52	66.89	94.80	94.83	7.60	7.87	621.12	623.32	69.88	70.46	263	260	1.93
1703	Bengkulu Utara	69.17	69.35	91.02	91.10	7.18	7.47	626.76	626.94	70.63	70.98	227	234	1.20
1704	Kaur	66.61	66.92	95.00	95.03	7.50	7.56	604.60	609.29	68.63	69.21	337	337	1.87
1705	Seluma	65.20	65.45	93.80	93.81	7.30	7.37	587.45	589.81	66.11	66.48	420	433	1.11
1706	Mukomuko	67.50	67.65	93.43	93.45	7.00	7.32	620.42	622.56	69.62	70.11	286	291	1.61
1707	Lebong	65.87	66.26	95.19	95.20	7.47	7.78	615.56	616.86	69.08	69.63	309	313	1.78
1708	Kepahiang	63.63	63.95	95.84	95.88	7.16	7.44	605.81	608.38	67.00	67.59	400	400	1.79
1709	Bengkulu Tengah	70.02	70.07	91.80	91.81	6.64	6.88	587.55	588.95	67.86	68.18	366	380	0.99
1771	Bengkulu	70.19	70.34	99.06	99.07	10.73	10.91	644.89	645.86	77.01	77.31	19	22	1.29
1800	LAMPUNG	69.00	69.25	93.63	94.37	7.30	7.49	615.03	617.42	70.30	70.93	20	21	2.12
1801	Lampung Barat	66.52	66.83	95.75	96.67	7.17	7.35	600.87	602.32	68.21	68.83	349	352	1.95
1802	Tanggamus	68.51	68.92	94.27	94.68	6.96	7.26	618.53	619.97	70.19	70.84	247	243	2.18
1803	Lampung Selatan	67.97	68.20	93.42	94.37	6.75	7.13	608.72	610.02	68.79	69.51	327	318	2.32

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 1

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan (ribu rupiah ppp)		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1804	Lampung Timur	69.81	70.02	92.40	93.32	6.90	6.98	608.47	610.33	69.68	70.20	277	280	1.72
1805	Lampung Tengah	68.92	69.09	92.17	93.08	7.20	7.22	615.84	617.71	69.93	70.38	260	267	1.50
1806	Lampung Utara	67.52	67.73	95.23	95.25	7.50	7.59	607.48	610.87	69.40	69.85	296	303	1.47
1807	Way Kanan	69.07	69.26	94.60	94.61	6.50	6.96	602.25	602.62	68.98	69.46	315	320	1.53
1808	Tulang Bawang	68.33	68.59	93.20	93.29	6.60	6.69	612.77	616.02	69.14	69.63	307	314	1.57
1809	Pesawaran	68.20	68.30	93.20	93.77	6.87	7.46	605.69	606.76	68.73	69.43	330	326	2.24
1810	Pringsewu	-	68.44	-	94.19	-	8.58	-	623.84	-	71.74	-	199	-
1811	Mesuji	-	68.39	-	91.74	-	6.04	-	594.84	-	67.06	-	417	-
1812	Tulang Bawang Barat	-	68.66	-	91.20	-	7.45	-	599.97	-	68.53	-	359	-
1871	Kota Bandar Lampung	70.13	70.50	97.86	98.44	9.89	9.91	628.95	630.76	74.86	75.35	65	63	1.94
1872	Kota Metro	72.22	72.38	97.26	97.36	9.80	9.82	627.53	629.39	75.71	75.98	46	51	1.11
1900	KEP. BANGKA BELITUNG	68.60	68.75	95.57	95.63	7.37	7.41	636.07	639.10	72.19	72.55	10	11	1.30
1901	Bangka	67.22	67.43	96.14	96.15	7.41	7.46	639.55	641.08	71.84	72.12	179	187	0.97
1902	Belitung	68.99	69.08	96.39	96.42	7.78	7.79	632.25	636.88	72.59	73.01	141	140	1.54
1903	Bangka Barat	67.54	67.66	92.59	92.85	6.67	6.72	624.21	625.64	69.50	69.77	293	308	0.89
1904	Bangka Tengah	67.66	67.79	95.79	95.80	6.73	6.75	628.71	630.49	70.68	70.90	222	239	0.76
1905	Bangka Selatan	67.31	67.51	92.55	92.70	5.92	5.97	590.09	591.87	66.18	66.50	416	432	0.95
1906	Belitung Timur	68.36	68.60	96.62	96.63	7.45	7.47	620.89	624.98	71.18	71.64	203	205	1.59
1971	Kota Pangkal Pinang	70.22	70.32	98.15	98.18	9.07	9.14	639.10	640.71	75.15	75.39	58	61	0.96
2100	KEPULAUAN RIAU	69.70	69.75	96.00	96.08	8.94	8.96	637.67	641.63	74.18	74.54	6	6	1.42
2101	Karimun	69.81	69.86	95.00	95.19	7.80	7.81	632.90	636.34	72.80	73.15	131	133	1.26
2102	Kepulauan Riau	69.61	69.66	94.40	94.50	7.95	8.00	641.60	644.59	73.34	73.66	105	111	1.20
2103	Natuna	68.10	68.21	95.75	95.92	6.90	6.93	612.75	615.21	69.81	70.11	268	290	1.01
2104	Lingga	69.88	70.02	90.90	91.11	7.20	7.22	623.18	625.42	70.74	71.05	220	231	1.07
2105	Kepulauan Anambas	67.07	67.23	89.72	90.00	5.25	5.35	622.75	626.35	67.44	67.94	387	393	1.55
2171	Kota Batam	70.70	70.76	98.84	98.85	10.70	10.71	645.52	648.13	77.28	77.51	14	16	1.04
2172	Kota Tanjung Pinang	69.51	69.56	97.30	97.31	9.20	9.24	629.50	633.65	73.92	74.31	88	89	1.47

Lanjutan Lampiran 1

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan (ribu rupiah ppp)		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3100	DKI JAKARTA	72.90	73.05	98.76	98.94	10.80	10.90	625.70	627.46	77.03	77.36	1	1	1.45
3101	Kep. Seribu	70.32	70.44	97.25	97.47	7.80	7.92	588.04	590.25	70.14	70.50	250	259	1.23
3171	Kota Jakarta Selatan	73.15	73.33	98.94	99.12	11.00	11.06	647.03	648.03	79.00	79.26	1	2	1.23
3172	Kota Jakarta Timur	72.97	73.16	98.97	98.98	11.00	11.04	642.29	643.12	78.54	78.74	3	4	0.92
3173	Kota Jakarta Pusat	72.05	72.18	99.28	99.36	10.60	10.68	644.22	645.20	77.95	78.17	6	8	1.00
3174	Kota Jakarta Barat	73.13	73.29	98.47	98.84	10.70	10.73	643.36	644.09	78.37	78.63	4	5	1.16
3175	Kota Jakarta Utara	72.56	72.69	98.39	98.86	9.90	9.96	637.69	639.34	77.01	77.36	20	20	1.52
3200	JAWA BARAT	67.80	68.00	95.53	95.98	7.50	7.72	626.81	628.71	71.12	71.64	15	15	1.80
3201	Bogor	68.03	68.44	93.59	94.29	7.20	7.54	627.74	628.34	70.66	71.35	225	216	2.34
3202	Sukabumi	66.43	66.74	96.59	97.33	6.39	6.54	625.50	626.15	69.66	70.17	279	286	1.66
3203	Cianjur	65.29	65.64	97.21	97.45	6.42	6.63	612.10	613.26	68.17	68.66	351	357	1.54
3204	Bandung	68.86	68.94	98.59	98.72	8.20	8.37	633.46	636.30	73.41	73.84	101	105	1.59
3205	Garut	64.80	65.20	98.89	98.93	7.10	7.29	634.95	636.01	70.52	70.98	233	236	1.55
3206	Tasikmalaya	67.53	67.75	98.81	98.88	6.80	6.98	629.09	630.56	71.35	71.73	198	200	1.32
3207	Ciamis	66.94	67.11	96.68	97.01	6.90	7.09	628.34	629.43	70.57	70.96	231	237	1.35
3208	Kuningan	67.23	67.35	93.86	94.28	6.80	6.87	629.46	630.62	70.12	70.42	251	264	1.00
3209	Cirebon	65.05	65.17	90.66	91.55	6.42	6.67	626.82	629.67	67.70	68.37	378	371	2.07
3210	Majalengka	65.82	66.09	94.81	95.03	6.70	6.83	628.61	631.79	69.40	69.94	297	300	1.75
3211	Sumedang	67.21	67.31	97.51	97.58	7.65	7.91	631.29	633.75	71.68	72.14	187	185	1.61
3212	Indramayu	66.01	66.41	85.58	85.60	5.50	5.64	631.40	635.04	66.78	67.39	404	407	1.85
3213	Subang	69.09	69.24	92.38	92.40	6.60	6.91	626.32	627.82	70.43	70.86	239	241	1.46
3214	Purwakarta	66.48	66.77	95.59	95.65	7.00	7.24	630.57	632.20	70.31	70.79	242	248	1.61
3215	Karawang	66.10	66.40	93.06	93.09	6.68	6.83	627.42	629.05	69.06	69.47	311	319	1.34
3216	Bekasi	68.74	69.07	93.67	93.69	8.10	8.21	632.42	633.74	72.10	72.47	159	163	1.33
3217	Kab Bandung Barat	68.58	68.61	98.00	98.04	8.00	8.04	629.21	632.85	72.65	72.99	137	141	1.23
3271	Kota Bogor	68.68	68.77	98.70	98.75	9.60	9.77	643.65	645.22	75.16	75.47	57	60	1.25
3272	Kota Sukabumi	68.92	69.18	99.64	99.66	9.00	9.21	632.17	633.32	74.17	74.57	84	86	1.52
3273	Kota Bandung	69.61	69.66	99.64	99.67	10.10	10.22	631.84	634.04	75.35	75.64	55	56	1.19

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 1

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan (ribu rupiah ppp)		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3274	Kota Cirebon	68.45	68.47	97.00	97.02	9.20	9.46	642.34	645.13	74.26	74.68	82	82	1.65
3275	Kota Bekasi	69.52	69.58	98.46	98.49	10.19	10.52	639.93	641.20	75.73	76.10	45	46	1.54
3276	Kota Depok	72.85	72.97	98.90	98.93	10.50	10.77	645.91	647.69	78.36	78.77	5	3	1.91
3277	Kota Cimahi	69.04	69.11	99.63	99.64	10.26	10.42	627.20	630.06	74.79	75.17	67	68	1.50
3278	Kota Tasikmalaya	69.13	69.49	99.42	99.45	8.40	8.59	626.35	629.71	73.35	73.96	104	99	2.30
3279	Kota Banjar	66.03	66.15	96.65	97.16	7.80	7.97	626.97	627.79	70.61	70.98	229	235	1.26
3300	JAWA TENGAH	71.10	71.25	89.24	89.46	6.86	7.07	633.59	636.39	71.60	72.10	14	14	1.77
3301	Cilacap	70.20	70.51	90.10	90.28	6.60	6.72	631.17	633.50	70.91	71.39	214	214	1.63
3302	Banyumas	69.61	69.67	93.92	93.98	7.49	7.72	626.94	630.75	71.77	72.27	183	181	1.79
3303	Purbalingga	69.69	69.94	93.01	93.02	6.46	6.81	627.57	630.44	70.89	71.51	215	211	2.13
3304	Banjarnegara	68.72	68.88	88.24	88.43	5.98	6.20	628.33	632.76	68.99	69.63	312	312	2.05
3305	Kebumen	69.21	69.26	90.39	90.40	6.65	6.84	627.57	632.43	70.19	70.73	248	249	1.82
3306	Purworejo	70.01	70.27	89.20	89.78	7.30	7.70	633.27	633.61	71.29	71.88	199	195	2.08
3307	Wonosobo	69.49	69.74	88.91	89.27	6.11	6.27	626.77	629.26	69.55	70.08	290	294	1.73
3308	Magelang	70.01	70.07	91.34	91.35	7.10	7.26	630.88	633.26	71.43	71.76	194	198	1.16
3309	Boyolali	70.24	70.30	85.96	85.97	7.10	7.29	626.14	629.49	69.99	70.44	258	263	1.47
3310	Klaten	71.15	71.33	89.28	89.70	7.75	7.93	641.86	643.92	72.93	73.41	123	123	1.79
3311	Sukoharjo	70.11	70.17	90.36	90.38	8.15	8.36	643.38	644.60	73.01	73.29	118	127	1.06
3312	Wonogiri	72.14	72.21	82.03	82.14	6.10	6.29	639.55	644.24	70.47	71.04	237	232	1.92
3313	Karanganyar	72.05	72.13	84.76	84.96	7.05	7.17	645.79	647.87	72.21	72.55	150	158	1.21
3314	Sragen	72.18	72.37	81.15	82.26	6.50	6.88	626.26	627.15	69.57	70.27	287	276	2.31
3315	Grobogan	69.42	69.57	90.18	90.36	6.60	6.76	627.60	629.42	70.22	70.60	245	252	1.29
3316	Blora	71.13	71.20	82.97	83.19	6.02	6.25	633.90	637.29	69.63	70.14	285	288	1.71
3317	Rembang	69.91	70.02	88.79	89.43	6.65	6.85	639.29	640.28	71.12	71.55	206	210	1.47
3318	Pati	72.72	72.77	86.28	86.38	6.80	6.95	639.68	643.48	72.26	72.72	148	152	1.64
3319	Kudus	69.51	69.57	91.98	92.48	7.80	8.11	633.57	635.90	72.02	72.57	164	157	1.97
3320	Jepara	70.58	70.71	92.92	93.09	7.22	7.40	627.68	631.04	71.94	72.45	171	165	1.82
3321	Demak	70.69	71.04	90.82	90.95	7.00	7.26	630.13	631.72	71.56	72.10	189	189	1.90

Lanjutan Lampiran 1

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan (ribu rupiah ppp)		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3322	Semarang	72.33	72.40	93.51	93.62	7.15	7.40	632.18	633.14	73.34	73.66	106	110	1.21
3323	Temanggung	72.32	72.43	95.93	95.94	6.70	6.86	630.82	633.87	73.43	73.85	99	104	1.56
3324	Kendal	67.77	68.10	88.93	88.96	6.69	6.90	631.64	635.70	69.40	70.07	298	295	2.17
3325	Batang	69.66	69.88	87.62	87.74	6.02	6.34	626.02	628.82	69.23	69.84	305	304	1.98
3326	Pekalongan	68.45	68.73	89.94	90.60	6.50	6.66	637.47	638.79	70.31	70.83	241	244	1.75
3327	Pemalang	67.24	67.46	87.34	87.75	6.10	6.49	632.39	634.26	68.38	69.02	345	344	2.04
3328	Tegal	68.19	68.49	89.09	89.21	6.24	6.42	634.24	637.09	69.54	70.08	292	293	1.78
3329	Brebes	67.08	67.37	84.85	85.21	5.50	5.62	629.64	633.23	67.08	67.69	395	395	1.85
3371	Kota Magelang	70.11	70.17	97.17	97.25	10.00	10.10	645.91	648.06	76.09	76.37	36	37	1.20
3372	Kota Surakarta	71.98	72.07	96.66	96.67	10.15	10.32	646.45	648.23	77.16	77.49	18	17	1.41
3373	Kota Salatiga	70.82	70.92	96.49	96.50	9.50	9.75	643.96	644.65	75.81	76.11	42	44	1.25
3374	Kota Semarang	72.01	72.07	95.94	96.44	9.80	9.98	643.55	644.63	76.54	76.90	29	29	1.53
3375	Kota Pekalongan	70.01	70.16	95.37	95.48	8.52	8.66	632.38	636.28	73.49	74.01	96	95	1.95
3376	Kota Tegal	68.37	68.56	94.87	94.88	8.06	8.25	646.30	648.66	73.20	73.63	113	115	1.61
3400	D I YOGYAKARTA	73.11	73.16	89.46	90.18	8.71	8.78	643.25	644.67	74.88	75.23	4	4	1.39
3401	Kulon Progo	73.79	74.09	88.72	89.52	7.80	7.89	628.29	629.50	73.26	73.77	110	106	1.88
3402	Bantul	71.11	71.21	88.60	89.14	8.55	8.64	642.19	643.89	73.38	73.75	102	107	1.40
3403	Gunung Kidul	70.79	70.88	84.50	84.52	7.60	7.61	621.67	623.09	70.00	70.18	255	285	0.58
3404	Sleman	74.43	74.74	91.49	92.19	10.10	10.18	645.15	646.08	77.24	77.70	15	14	2.05
3471	Kota Yogyakarta	73.27	73.35	97.70	97.94	11.42	11.48	645.10	647.59	78.95	79.29	2	1	1.61
3500	JAWA TIMUR	69.10	69.35	87.43	87.80	6.95	7.20	636.61	640.12	70.38	71.06	18	18	2.29
3501	Pacitan	70.83	71.04	91.54	91.56	6.63	6.71	622.23	626.79	70.91	71.45	213	212	1.85
3502	Ponorogo	69.31	69.62	84.93	85.72	6.46	6.61	629.87	632.84	69.07	69.75	310	309	2.21
3503	Trenggalek	71.11	71.36	92.26	92.69	7.05	7.19	630.18	633.18	72.15	72.72	155	150	2.05
3504	Tulungagung	70.99	71.23	93.47	93.50	7.50	7.80	627.11	628.55	72.45	72.93	146	144	1.74
3505	Blitar	70.44	70.66	91.04	91.90	7.09	7.23	645.73	646.62	72.74	73.22	135	130	1.77
3506	Kediri	69.18	69.42	92.47	92.76	7.45	7.59	622.78	625.06	70.85	71.33	216	220	1.64
3507	Malang	68.43	68.70	89.17	89.54	6.66	6.80	628.38	631.08	69.55	70.09	288	292	1.78
3508	Lumajang	66.58	66.87	86.28	86.30	5.90	6.03	619.67	624.20	66.65	67.26	408	411	1.85

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 1

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan (ribu rupiah ppp)		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
3509	Jember	62.47	62.66	82.84	83.08	6.29	6.45	617.34	621.90	63.71	64.33	451	460	1.72
3510	Banyuwangi	66.78	67.18	86.46	86.48	6.68	6.81	625.13	628.20	67.80	68.36	373	372	1.75
3511	Bondowoso	62.61	62.92	74.30	75.31	5.20	5.49	619.70	622.78	61.26	62.11	461	471	2.19
3512	Situbondo	62.84	63.02	78.16	78.20	5.68	5.99	625.54	629.38	63.06	63.69	456	466	1.71
3513	Probolinggo	60.56	60.85	77.71	77.86	5.00	5.08	628.92	634.55	61.44	62.13	460	470	1.78
3514	Pasuruan	63.40	63.70	88.13	88.93	6.16	6.33	626.54	631.17	66.02	66.84	425	420	2.42
3515	Sidoarjo	70.08	70.31	97.37	97.40	9.49	9.78	640.90	643.30	75.35	75.88	54	52	2.17
3516	Mojokerto	69.75	69.97	94.07	94.09	7.67	7.79	633.42	636.10	72.51	72.93	143	143	1.55
3517	Jombang	69.89	69.99	92.48	92.50	7.48	7.76	630.21	633.05	71.85	72.33	177	173	1.72
3518	Nganjuk	68.44	68.67	90.44	90.46	6.83	7.11	625.24	628.01	69.73	70.27	274	275	1.81
3519	Madiun	68.55	68.72	87.10	88.31	6.72	6.96	620.99	622.39	68.63	69.28	336	332	2.06
3520	Magetan	70.68	70.93	89.80	90.28	7.41	7.55	632.14	634.61	71.79	72.32	181	174	1.90
3521	Ngawi	69.25	69.58	85.10	85.12	6.14	6.34	619.37	620.09	68.02	68.41	356	367	1.22
3522	Bojonegoro	66.87	67.01	84.55	84.58	6.39	6.53	607.27	611.91	65.83	66.38	428	434	1.60
3523	Tuban	67.34	67.56	84.95	85.56	6.09	6.22	621.03	625.02	67.02	67.68	399	396	2.01
3524	Lamongan	67.85	68.02	86.60	86.97	6.76	7.03	623.19	627.28	68.33	69.03	346	343	2.19
3525	Gresik	70.49	70.73	94.04	94.36	8.40	8.49	633.90	636.68	73.49	73.98	95	97	1.82
3526	Bangkalan	63.01	63.16	82.76	82.82	5.00	5.13	622.09	627.34	63.40	64.00	454	463	1.65
3527	Sampang	61.69	62.34	64.12	64.81	3.77	3.93	622.77	627.68	57.66	58.68	470	478	2.39
3528	Pamekasan	63.19	63.59	79.57	80.21	5.72	5.73	619.49	623.58	63.13	63.81	455	465	1.85
3529	Sumenep	64.35	64.53	78.62	78.63	5.01	5.20	635.21	639.49	64.24	64.82	448	455	1.60
3571	Kota Kediri	69.95	70.18	97.40	97.41	9.66	10.00	636.89	639.50	75.11	75.68	59	55	2.32
3572	Kota Blitar	71.66	71.95	97.22	97.23	9.55	9.71	645.52	646.93	76.60	76.98	27	27	1.64
3573	Kota Malang	69.61	69.96	97.19	97.19	10.80	10.82	643.17	646.86	76.19	76.69	33	32	2.10
3574	Kota Probolinggo	69.48	69.83	92.32	92.33	8.29	8.35	644.53	647.18	73.29	73.73	109	108	1.65
3575	Kota Pasuruan	66.29	66.33	95.93	96.14	8.74	8.81	643.92	647.73	72.60	73.01	139	139	1.53
3576	Kota Mojokerto	71.13	71.35	97.10	97.11	9.66	9.67	642.41	644.86	76.11	76.43	35	36	1.33
3577	Kota Madiun	70.60	70.81	97.71	97.75	10.17	10.38	636.65	637.39	75.89	76.23	40	39	1.39
3578	Kota Surabaya	70.40	70.71	97.94	98.00	9.84	9.94	646.67	649.24	76.36	76.82	31	31	1.92
3579	Kota Batu	68.87	69.16	97.30	97.78	8.20	8.34	636.04	638.39	73.33	73.88	108	102	2.08
3600	BANTEN	64.60	64.75	95.60	95.95	8.10	8.15	625.52	627.63	69.70	70.06	23	23	1.19
3601	Pandeglang	63.28	63.52	96.29	96.30	6.38	6.44	624.33	625.06	67.75	67.99	375	391	0.73
3602	Lebak	63.14	63.21	94.10	94.55	6.20	6.22	625.08	627.49	67.11	67.45	394	405	1.04
3603	Tangerang	65.44	65.61	95.34	95.66	8.90	8.93	631.19	632.77	71.14	71.45	205	213	1.07
3604	Serang	62.65	63.08	94.58	94.93	7.00	7.04	628.50	630.08	67.80	68.27	372	374	1.45

Lanjutan Lampiran 1

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan (ribu rupiah ppp)		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
3671	Kota Tangerang	68.29	68.33	98.34	98.35	9.82	9.95	639.44	640.27	74.70	74.89	69	75	0.74
3672	Kota Cilegon	68.49	68.53	98.70	98.71	9.64	9.66	641.75	641.88	74.94	74.99	64	73	0.21
3673	Kota Serang	64.12	64.62	95.85	96.27	7.01	7.25	635.31	635.34	69.43	69.99	294	299	1.82
3674	Kota Tangerang Selatan	-	68.43	-	98.14	-	9.95	-	641.72	-	75.01	-	71	-
5100	BALI	70.61	70.67	86.94	87.22	7.81	7.83	626.63	632.15	70.98	71.52	16	16	1.84
5101	Jembrana	71.65	71.73	88.96	89.60	7.60	7.65	628.68	631.43	72.02	72.45	165	166	1.54
5102	Tabanan	74.27	74.38	89.15	89.31	7.78	7.84	629.83	634.87	73.73	74.26	91	90	2.01
5103	Badung	71.70	71.75	92.16	92.29	9.11	9.18	631.88	635.33	74.12	74.49	86	87	1.44
5104	Gianyar	72.01	72.06	85.00	85.40	7.94	8.03	634.08	637.30	72.00	72.43	168	168	1.55
5105	Klungkung	69.00	69.05	80.98	81.10	7.02	7.03	645.88	652.00	69.66	70.19	280	281	1.75
5106	Bangli	71.47	71.56	82.11	82.23	6.50	6.52	630.57	635.76	69.72	70.21	275	279	1.60
5107	Karangasem	67.80	67.85	72.14	72.27	5.37	5.41	641.30	648.01	65.46	66.06	435	440	1.74
5108	Buleleng	68.78	68.96	87.60	87.84	6.89	7.09	629.77	633.40	69.67	70.26	278	278	1.95
5171	Kota Denpasar	72.91	72.96	97.14	97.27	10.47	10.49	635.43	639.43	77.18	77.56	17	15	1.66
5200	NUSA TENGGARA BARAT	61.50	61.80	80.13	80.18	6.70	6.73	633.58	637.98	64.12	64.66	32	32	1.50
5201	Lombok Barat	59.97	60.40	76.40	76.41	5.73	5.87	618.09	623.21	60.53	61.27	463	473	1.89
5202	Lombok Tengah	60.24	60.66	71.16	71.20	5.35	5.64	623.57	625.37	59.66	60.26	465	475	1.48
5203	Lombok Timur	59.70	60.26	79.81	79.92	6.31	6.33	620.66	621.85	61.77	62.21	459	469	1.14
5204	Sumbawa	60.51	60.61	89.69	89.75	7.10	7.12	625.40	628.99	65.36	65.72	436	445	1.04
5205	Dompu	60.83	60.94	82.80	82.82	7.00	7.20	631.47	635.53	64.40	64.93	446	452	1.48
5206	Bima	62.31	62.62	85.75	85.83	7.23	7.24	609.88	612.72	64.39	64.81	447	456	1.18
5207	Sumbawa Barat	60.94	61.11	90.71	90.72	7.00	7.16	623.92	627.86	65.64	66.16	431	438	1.51
5208	Lombok Utara	59.80	60.18	70.86	71.01	4.68	4.98	609.87	611.71	57.79	58.40	468	480	1.44
5271	Kota Mataram	65.66	66.15	91.80	91.81	9.05	9.20	641.94	642.17	71.41	71.82	195	197	1.42
5272	Kota Bima	62.74	62.86	92.59	92.84	9.24	9.25	608.42	613.14	67.52	68.02	384	389	1.52
5300	NUSA TENGGARA TIMUR	67.00	67.25	87.66	87.96	6.55	6.60	599.93	602.60	66.15	66.60	31	31	1.32
5301	Sumba Barat	64.48	64.82	77.91	78.39	5.84	5.96	601.47	605.83	62.17	62.90	458	467	1.92
5302	Sumba Timur	61.62	61.78	82.96	83.01	5.93	5.99	588.89	594.90	60.80	61.41	462	472	1.56
5303	Kupang	65.02	65.24	88.72	89.00	6.71	6.72	595.02	599.85	65.02	65.58	439	447	1.60
5304	Timor Tengah Selatan	66.60	66.75	84.18	84.37	6.08	6.12	600.29	604.16	64.83	65.28	440	448	1.28
5305	Timor Tengah Utara	67.71	68.11	87.45	87.73	6.24	6.38	603.37	603.75	66.53	66.95	411	419	1.26
5306	Belu	65.30	65.65	82.79	82.98	6.06	6.24	595.48	597.13	63.41	63.91	453	464	1.36
5307	Alor	66.25	66.58	95.94	95.97	7.38	7.41	595.18	596.80	67.82	68.16	368	383	1.04
5308	Lembata	66.34	66.46	92.57	92.76	6.47	6.50	597.29	602.57	66.61	67.15	409	416	1.62

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 1

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan (ribu rupiah ppp)		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
5309	Flores Timur	67.51	67.81	88.79	89.08	6.58	6.60	608.26	610.53	67.34	67.77	389	394	1.31
5310	Sikka	68.40	68.71	90.47	91.27	6.13	6.15	592.85	595.81	66.69	67.29	407	410	1.78
5311	Ende	64.41	64.61	93.21	93.50	6.77	7.05	600.46	601.30	66.14	66.59	417	430	1.34
5312	Ngada	66.93	67.05	94.49	94.94	6.73	6.97	610.30	611.66	68.56	69.01	339	345	1.43
5313	Manggarai	66.89	67.09	90.97	91.07	6.71	6.72	590.37	596.62	66.21	66.83	415	421	1.84
5314	Rote Nda	67.22	67.64	88.55	88.88	6.18	6.20	588.22	590.62	65.29	65.80	437	444	1.46
5315	Manggarai Barat	65.99	66.19	88.70	88.75	6.23	6.30	585.20	588.95	64.44	64.91	444	453	1.31
5316	Sumba Barat Daya	63.11	63.37	72.01	72.15	5.40	5.72	602.72	605.98	59.87	60.54	464	474	1.65
5317	Sumba Tengah	62.42	62.58	71.81	71.91	5.20	5.21	598.95	608.14	59.01	59.84	467	476	2.02
5318	Nageko	63.27	63.40	93.76	94.01	6.69	6.74	602.55	603.42	65.73	65.97	430	442	0.68
5319	Manggarai Timur	67.04	67.30	89.18	89.30	5.92	6.20	581.05	581.85	64.58	65.02	443	451	1.24
5320	Sabu Raijua	-	66.87	-	74.35	-	4.47	-	508.51	-	54.53	-	482	-
5371	Kota Kupang	71.93	72.34	98.33	98.47	10.89	10.91	627.31	628.37	76.58	76.94	28	28	1.54
6100	KALIMANTAN BARAT	66.30	66.45	89.40	89.70	6.70	6.75	624.74	630.34	68.17	68.79	29	28	1.94
6101	Sambas	60.70	60.91	89.50	90.00	5.90	5.94	614.92	621.09	63.73	64.46	450	459	2.00
6102	Bengkayang	68.57	68.70	88.68	88.70	6.03	6.09	599.30	602.47	66.81	67.18	403	415	1.12
6103	Landak	64.98	65.22	91.45	91.48	6.86	6.92	608.21	612.01	66.74	67.21	406	413	1.44
6104	Pontianak	67.12	67.18	89.40	89.90	6.48	6.53	617.52	621.74	67.90	68.41	363	368	1.57
6105	Sanggau	67.99	68.24	89.92	89.95	6.40	6.41	609.95	612.24	67.86	68.19	364	378	1.03
6106	Ketapang	67.02	67.23	88.87	89.17	6.22	6.30	608.43	612.63	66.84	67.41	402	406	1.70
6107	Sintang	67.91	68.12	90.41	90.45	6.58	6.59	602.01	607.55	67.44	68.00	386	390	1.72
6108	Kapuas Hulu	66.39	66.49	92.55	92.59	7.10	7.15	627.31	630.97	69.41	69.79	295	307	1.25
6109	Sekadau	67.27	67.31	88.98	89.02	6.06	6.07	598.62	604.66	66.13	66.63	419	426	1.49
6110	Melawai	67.63	67.69	92.32	92.36	7.20	7.21	598.62	604.95	67.91	68.45	361	363	1.69
6111	Kayong Utara	65.33	65.50	88.20	88.24	5.60	5.65	600.67	603.75	64.69	65.07	442	450	1.07
6112	Kubu Raya	66.17	66.24	85.83	86.15	6.16	6.36	617.00	619.72	66.31	66.77	414	423	1.39
6171	Kota Pontianak	66.86	67.04	93.59	94.08	9.11	9.20	636.18	636.96	72.08	72.41	160	169	1.21
6172	Kota Singkawang	66.95	67.08	89.62	89.65	7.30	7.34	611.76	616.18	68.02	68.47	357	362	1.40
6200	KALIMANTAN TENGAH	71.00	71.10	97.67	97.69	8.00	8.02	628.64	633.91	73.88	74.36	7	7	1.84
6201	Kotawaringin Barat	71.18	71.32	94.09	94.52	7.60	7.62	628.33	631.55	72.86	73.30	125	125	1.60
6202	Kotawaringin Timur	69.29	69.43	98.70	98.71	8.00	8.03	631.34	637.89	73.36	73.97	103	98	2.27
6203	Kapuas	70.54	70.66	96.13	96.14	7.30	7.32	630.24	633.46	72.89	73.22	124	131	1.22
6204	Barito Selatan	68.14	68.21	98.95	98.97	8.35	8.36	630.29	633.87	72.96	73.29	120	126	1.22
6205	Barito Utara	71.72	71.88	98.17	98.19	8.37	8.38	627.44	629.70	74.57	74.85	72	76	1.07
6206	Sukamara	67.73	67.79	95.53	95.56	7.02	7.05	630.42	637.60	71.00	71.62	210	207	2.13
6207	Lamandau	67.05	67.13	98.64	98.65	7.60	7.61	633.50	634.14	71.98	72.08	170	190	0.36

Lanjutan Lampiran 1

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan (ribu rupiah ppp)		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
6208	Seruyan	67.90	67.94	99.30	99.31	7.70	7.72	624.81	627.91	72.00	72.28	167	180	1.01
6209	Katingan	67.30	67.40	99.40	99.41	7.76	7.77	629.00	631.70	72.06	72.33	162	172	0.99
6210	Pulang Pisau	67.38	67.47	93.84	93.85	7.22	7.23	631.13	637.47	70.63	71.18	226	226	1.87
6211	Gunung Mas	67.68	67.82	99.51	99.53	8.68	8.70	627.39	629.79	72.85	73.13	127	134	1.04
6212	Barito Timur	67.73	67.79	97.95	97.97	8.44	8.50	625.01	631.03	72.17	72.72	152	151	1.98
6213	Murung Raya	67.95	68.03	99.93	99.94	6.96	7.12	632.00	633.55	72.18	72.46	151	164	1.02
6271	Kota Palangka Raya	73.17	73.28	99.47	99.48	10.50	10.54	635.88	636.38	77.90	78.02	8	9	0.57
6300	KALIMANTAN SELATAN	63.10	63.45	95.30	95.41	7.44	7.54	630.83	634.59	68.72	69.30	26	26	1.86
6301	Tanah Laut	67.90	68.14	93.18	93.28	6.61	6.62	632.18	632.86	70.40	70.62	240	250	0.74
6302	Kota Baru	64.98	65.22	94.00	94.02	7.00	7.03	648.61	650.97	70.52	70.86	234	242	1.15
6303	Banjar	64.62	64.93	95.99	96.02	7.10	7.16	639.84	641.64	70.16	70.52	249	256	1.22
6304	Barito Kuala	61.18	61.52	92.18	92.19	6.68	6.81	626.83	632.30	66.09	66.80	422	422	2.10
6305	Tapin	66.91	67.07	93.92	94.22	6.94	7.11	626.06	626.90	69.79	70.13	269	289	1.12
6306	Hulu Sungai Selatan	63.42	63.68	96.47	96.59	7.33	7.34	644.17	647.02	70.11	70.50	252	258	1.33
6307	Hulu Sungai Tengah	64.54	64.91	97.40	97.41	7.39	7.43	631.50	634.39	70.00	70.46	256	262	1.54
6308	Hulu Sungai Utara	62.28	62.68	95.86	95.87	7.22	7.23	626.09	630.85	67.86	68.45	365	364	1.85
6309	Tabalong	62.74	62.91	95.92	95.93	7.76	7.83	631.90	636.13	68.98	69.45	316	323	1.53
6310	Tanah Bumbu	64.32	64.63	94.08	94.27	7.00	7.09	630.86	633.00	68.80	69.24	326	335	1.43
6311	Balangan	61.36	61.55	94.90	94.91	6.30	6.48	614.93	617.80	65.60	66.06	432	441	1.34
6371	Kota Banjarmasin	65.92	66.03	97.94	98.28	9.27	9.55	638.87	642.78	72.85	73.49	128	120	2.37
6372	Kota Banjar Baru	67.14	67.31	97.75	98.10	9.54	9.74	644.07	644.38	74.09	74.43	87	88	1.33
6400	KALIMANTAN TIMUR	70.80	71.00	96.36	96.89	8.80	8.85	634.52	638.73	74.52	75.11	5	5	2.32
6401	Pasir	72.39	72.74	94.61	95.41	7.61	7.75	625.82	626.47	73.46	73.99	97	96	2.00
6402	Kutai Barat	69.89	70.08	95.49	95.97	7.75	7.79	623.05	625.57	72.16	72.60	154	155	1.59
6403	Kutai	67.76	67.85	96.41	96.87	8.30	8.33	628.71	632.64	72.03	72.50	163	160	1.69
6404	Kutai Timur	68.25	68.43	95.48	95.89	7.61	7.65	619.00	621.34	70.84	71.23	217	223	1.36
6405	Berau	69.41	69.66	95.48	96.30	7.86	7.91	633.12	634.47	72.75	73.22	134	129	1.70
6406	Malinau	68.11	68.22	92.33	92.65	7.61	7.67	641.32	645.91	71.78	72.30	182	177	1.85
6407	Bulongan	72.55	72.73	95.50	95.55	7.72	7.88	631.82	633.85	74.30	74.68	80	83	1.48
6408	Nunukan	71.07	71.30	93.30	93.94	7.40	7.42	633.26	637.56	72.86	73.48	126	121	2.28
6409	Penajam Paser Utara	71.18	71.32	94.46	94.93	7.57	7.58	625.27	628.25	72.69	73.11	136	136	1.54
6410	Tana Tidung	72.58	72.61	88.00	88.49	7.00	7.05	613.17	616.13	70.68	71.07	221	230	1.33
6471	Kota Balikpapan	71.73	71.95	98.32	98.37	10.03	10.05	646.41	651.65	77.31	77.86	12	12	2.43
6472	Kota Samarinda	70.81	71.01	97.23	97.91	9.73	9.77	643.80	647.22	76.12	76.68	34	33	2.36

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 1

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan (ribu rupiah ppp)		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
6473	Kota Tarakan	71.37	71.55	97.89	97.92	9.30	9.33	639.38	643.45	75.92	76.37	38	38	1.84
6474	Kota Bontang	72.11	72.26	98.34	99.08	9.97	10.01	628.37	630.41	76.08	76.52	37	35	1.84
7100	SULAWESI UTARA	72.01	72.12	99.31	99.41	8.80	8.82	625.58	631.00	75.16	75.68	2	2	2.07
7101	Bolaang Mongondow	71.19	71.38	98.22	98.23	7.39	7.39	608.55	612.39	72.11	72.52	158	159	1.47
7102	Minahasa	72.18	72.33	99.52	99.68	8.80	9.01	619.74	621.74	74.86	75.28	66	65	1.69
7103	Kep.Sangihe Talaud	72.50	72.75	98.50	98.54	7.70	7.71	628.55	633.60	74.67	75.21	70	67	2.15
7104	Kepulauan Talaud	71.29	71.59	99.30	99.36	8.47	8.65	623.35	625.68	74.34	74.83	79	78	1.92
7105	Minahasa Selatan	71.89	72.09	99.40	99.42	8.54	8.54	610.86	614.47	73.79	74.18	89	92	1.51
7106	Minahasa Utara	72.20	72.40	99.68	99.70	9.07	9.09	622.71	624.14	75.33	75.57	56	57	0.98
7107	Bolaang Mongondow Utara	69.45	69.68	98.30	98.31	7.10	7.31	620.13	622.01	71.84	72.27	180	182	1.53
7108	Minahasa Tenggara	69.77	69.90	99.38	99.48	8.08	8.09	605.77	610.08	71.87	72.31	175	176	1.54
7109	Kep. Siau Tagulandang Biaro	68.31	68.46	99.61	99.68	8.24	8.30	623.27	625.12	72.58	72.86	142	147	1.05
7110	Bolaang Mongondow Selatan	71.20	71.25	98.21	98.31	6.05	6.10	589.52	593.25	69.65	70.03	282	297	1.23
7111	Bolaang Mongondow Timur	71.22	71.28	99.38	99.50	6.30	6.35	607.37	610.81	71.49	71.85	191	196	1.27
7171	Manado	72.37	72.50	99.83	99.86	10.58	10.59	631.88	637.32	77.28	77.79	13	13	2.25
7172	Kota Bitung	70.20	70.35	99.03	99.13	9.20	9.20	628.47	632.04	74.61	75.00	71	72	1.51
7173	Kota Tomohon	72.16	72.39	99.83	99.84	9.60	9.89	621.61	622.79	75.65	76.09	50	47	1.80
7174	Kota Kotamobago	71.35	71.58	99.49	99.60	8.85	9.00	620.26	624.16	74.46	75.03	74	70	2.21
7200	SULAWESI TENGAH	66.10	66.35	95.68	95.78	7.81	7.89	622.35	627.40	70.09	70.70	22	22	2.04
7201	Banggai Kepulauan	63.09	63.59	94.92	94.93	7.09	7.30	607.70	610.09	66.59	67.21	410	414	1.86
7202	Banggai	68.10	68.31	95.69	95.94	7.59	7.75	611.55	616.43	70.21	70.87	246	240	2.22
7203	Morowali	65.22	65.38	97.24	97.44	7.63	7.85	621.47	626.84	69.75	70.46	273	261	2.34
7204	Poso	64.53	64.74	97.88	97.90	8.31	8.44	608.17	613.66	68.98	69.62	314	315	2.06
7205	Donggala	64.53	64.90	93.87	94.14	7.48	7.52	624.45	629.24	68.73	69.40	329	328	2.13
7206	Toli-Toli	63.83	64.04	95.12	95.16	7.32	7.40	612.93	617.88	67.62	68.18	380	379	1.75
7207	Buol	64.94	65.16	98.20	98.22	8.15	8.18	604.04	609.98	68.84	69.45	325	322	1.96
7208	Parigi Moutong	64.53	64.84	93.55	93.68	7.02	7.10	617.86	621.79	67.81	68.37	370	370	1.75
7209	Tojo Una-Una	63.59	63.73	97.44	97.46	7.81	7.89	605.77	611.32	67.81	68.38	371	369	1.78
7210	Sigi	64.88	65.12	96.37	96.38	7.94	7.95	586.52	588.85	66.90	67.22	401	412	0.98
7271	Kodya Palu	69.44	69.71	99.23	99.25	10.87	10.95	631.07	632.45	75.67	75.99	48	50	1.31
7300	SULAWESI SELATAN	69.60	69.80	86.53	87.02	7.23	7.41	630.81	635.48	70.22	70.94	21	20	2.39
7301	Selayar	67.47	67.61	88.99	89.23	6.62	6.75	619.02	624.31	68.23	68.86	348	350	1.99

Lanjutan Lampiran 1

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan (ribu rupiah ppp)		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
7302	Bulukumba	71.32	71.62	85.20	85.35	6.45	6.69	625.22	629.12	69.87	70.55	264	253	2.27
7303	Bantaeng	72.65	73.12	76.58	77.51	5.80	5.87	633.78	633.92	68.87	69.40	323	327	1.71
7304	Jeneponto	64.70	64.85	76.48	77.20	5.86	5.88	628.00	631.09	64.04	64.54	449	458	1.39
7305	Takalar	68.67	69.17	80.09	80.75	6.21	6.23	630.44	631.82	67.49	68.04	385	387	1.67
7306	Gowa	71.25	71.43	79.78	80.27	6.36	6.57	635.69	639.15	69.37	70.00	300	298	2.06
7307	Sinjai	71.24	71.61	86.44	86.45	6.62	6.71	605.88	608.34	68.74	69.21	328	339	1.49
7308	Maros	71.14	71.71	82.89	82.90	6.47	6.50	632.59	637.20	69.85	70.55	265	254	2.32
7309	Pangkajene Kepulauan	68.44	68.62	85.89	86.86	6.52	6.61	622.78	627.88	68.30	69.07	347	342	2.43
7310	Barru	68.22	68.54	87.66	88.48	7.17	7.39	629.25	632.35	69.54	70.30	291	274	2.48
7311	Bone	68.96	69.35	84.78	84.85	6.21	6.38	633.90	638.01	68.96	69.63	317	311	2.15
7312	Soppeng	71.42	71.52	84.59	85.08	6.85	6.98	633.89	636.96	70.76	71.26	219	221	1.73
7313	Wajo	69.86	70.40	81.97	82.69	5.80	6.06	636.25	637.22	68.72	69.44	332	324	2.32
7314	Sidenreng Rappang	71.65	72.07	89.52	89.57	7.20	7.24	627.36	627.99	71.74	72.06	184	191	1.15
7315	Pinrang	71.38	71.72	89.10	89.74	6.88	7.22	635.82	637.37	71.91	72.61	174	154	2.49
7316	Enrekang	74.34	74.66	89.76	90.44	8.14	8.25	624.45	624.74	73.76	74.19	90	91	1.64
7317	Luwu	72.80	73.25	91.47	91.48	7.70	7.71	624.50	629.25	72.96	73.59	121	117	2.32
7318	Tana Toraja	74.09	74.13	84.96	85.45	7.43	7.46	608.62	614.14	70.81	71.39	218	215	1.99
7322	Luwu Utara	71.13	71.34	92.03	92.05	7.00	7.04	644.13	648.64	73.15	73.65	116	112	1.86
7325	Luwu Timur	70.72	70.84	93.13	93.24	7.47	7.75	620.99	624.35	71.73	72.29	185	179	1.96
7326	Toraja Utara	73.45	73.49	82.26	83.03	7.02	7.03	593.87	597.86	68.41	68.92	344	346	1.61
7371	Kota Makassar	72.89	73.24	96.62	96.68	10.50	10.60	646.37	646.96	77.92	78.24	7	7	1.46
7372	Kota Pare Pare	73.58	73.92	96.49	97.06	9.45	9.63	639.61	640.04	76.97	77.45	21	18	2.08
7373	Kota Palopo	72.03	72.25	97.30	97.32	9.66	9.73	631.24	633.02	75.80	76.11	43	43	1.28
7400	SULAWESI TENGGARA	67.40	67.60	91.42	91.51	7.74	7.90	611.72	615.29	69.00	69.52	25	25	1.69
7401	Buton	67.89	68.23	85.72	85.72	6.27	6.52	623.50	624.09	67.82	68.24	369	376	1.32
7402	Muna	65.79	65.88	87.59	87.83	7.30	7.35	606.14	611.30	66.49	67.03	412	418	1.62
7403	Konawe/Kab Kendari	66.74	67.01	94.60	94.61	7.98	8.01	601.40	606.24	68.72	69.27	331	334	1.75
7404	Kolaka	66.61	66.87	93.14	93.16	7.70	7.71	626.63	629.26	70.06	70.41	254	265	1.19
7405	Konawe Selatan	67.31	67.47	94.10	94.11	7.60	7.62	604.15	607.83	68.86	69.24	324	336	1.23
7406	Bombana	67.30	67.51	88.20	88.49	6.23	6.59	598.00	599.84	66.05	66.63	423	427	1.72
7407	Wakatobi	67.83	67.95	88.80	89.13	6.52	6.85	589.39	593.12	66.03	66.70	424	424	1.96
7408	Kolaka Utara	65.27	65.41	93.02	93.04	7.40	7.51	611.61	617.20	67.91	68.50	362	360	1.85
7409	Konawe Utara	67.64	67.96	86.50	86.59	7.59	7.87	601.82	602.44	67.16	67.62	388	399	1.40

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 1

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan (ribu rupiah ppp)		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
7410	Buton Utara	66.47	66.76	93.80	93.80	7.00	7.05	598.33	602.70	67.43	67.97	393	392	1.65
7471	Kota Kendari	68.95	69.02	98.37	98.38	11.01	11.13	628.14	629.31	75.09	75.31	60	64	0.88
7472	Kota Bau-Bau	69.79	70.09	95.16	95.30	9.55	9.75	607.11	612.11	72.14	72.87	156	146	2.61
7500	GORONTALO	66.20	66.50	95.75	95.77	6.91	7.18	619.70	621.31	69.29	69.79	24	24	1.62
7501	Boalemo	67.52	67.78	95.20	95.26	6.00	6.07	600.56	601.37	67.75	68.03	376	388	0.85
7502	Gorontalo	67.71	68.17	94.55	94.57	6.47	6.77	611.98	613.56	68.94	69.55	319	317	1.95
7503	Pokuwato	67.23	67.44	97.03	97.04	6.05	6.42	612.15	613.58	68.93	69.43	320	325	1.63
7504	Bone Bolango	67.88	68.22	97.10	97.15	7.45	7.77	614.20	617.53	70.50	71.19	235	225	2.36
7505	Gorontalo Utara	66.11	66.47	93.70	93.77	6.20	6.24	618.14	618.54	68.14	68.41	352	366	0.87
7571	Kota Gorontalo	66.26	66.44	99.41	99.42	9.46	9.50	620.96	623.35	72.12	72.44	157	167	1.13
7600	SULAWESI BARAT	67.40	67.60	87.31	87.59	6.99	7.05	625.04	630.32	68.55	69.18	27	27	1.99
7601	Majene	64.74	65.06	94.70	94.71	8.14	8.18	634.30	638.64	70.28	70.83	243	245	1.84
7602	Polewali Mamasa	64.44	64.71	83.50	83.81	6.81	6.90	624.77	630.16	65.91	66.61	427	429	2.05
7603	Mamasa	70.94	71.07	84.62	85.12	6.38	6.55	629.19	630.27	69.79	70.18	270	284	1.27
7604	Mamuju	68.00	68.26	88.77	89.08	6.72	6.79	618.34	620.08	68.50	68.89	341	349	1.24
7605	Mamuju Utara	67.47	67.51	95.33	95.56	6.62	6.71	614.25	616.07	69.27	69.55	303	316	0.91
8100	MALUKU	67.00	67.20	98.12	98.13	8.60	8.63	605.02	610.73	70.38	70.96	19	19	1.94
8101	Maluku Tenggara Barat	63.99	64.13	99.34	99.35	8.51	8.54	587.68	593.10	67.58	68.10	381	385	1.60
8102	Maluku Tenggara	67.59	67.79	99.52	99.54	8.74	8.75	609.27	616.49	71.45	72.13	193	186	2.38
8103	Maluku Tengah	65.48	65.62	99.08	99.09	8.18	8.34	607.51	613.97	69.63	70.32	284	272	2.27
8104	Buru	67.17	67.61	92.80	92.82	7.20	7.21	602.01	607.35	68.03	68.70	355	354	2.10
8105	Kepulauan Aru	67.31	67.52	98.80	99.00	7.50	7.52	598.06	603.23	69.36	69.93	301	301	1.88
8106	Seram Bagian Barat	66.33	66.45	98.00	98.22	8.20	8.23	591.82	597.04	68.67	69.21	334	338	1.72
8107	Seram Bagian Timur	65.43	65.64	97.93	98.14	7.60	7.62	583.45	588.83	67.06	67.66	397	397	1.81
8108	Maluku Barat Daya	63.72	63.93	98.11	98.12	7.98	7.99	577.29	579.24	65.96	66.24	426	436	0.82
8109	Buru Selatan	66.87	67.11	89.54	89.74	6.20	6.29	619.04	621.91	67.71	68.17	377	381	1.42
8171	Kota Ambon	72.70	72.85	99.19	99.20	11.09	11.12	633.91	637.60	77.86	78.25	9	6	1.78
8172	Kota Tual	68.03	68.37	99.68	99.70	9.44	9.45	656.60	657.99	75.90	76.20	39	41	1.27
8200	MALUKU UTARA	65.40	65.70	95.44	95.74	8.60	8.61	595.69	598.45	68.18	68.63	28	29	1.43
8201	Halmahera Barat	63.94	64.16	95.30	95.70	7.65	7.75	589.32	591.97	66.14	66.63	418	428	1.45
8202	Halmahera Tengah	65.79	66.18	96.70	96.75	8.00	8.02	595.04	598.19	68.18	68.67	350	355	1.55
8203	Kepulauan Sula	64.30	64.65	97.33	97.37	7.70	7.72	592.12	595.18	67.04	67.50	398	403	1.38
8204	Halmahera Selatan	65.03	65.25	95.80	95.82	7.40	7.44	596.82	599.60	67.25	67.62	390	398	1.13
8205	Halmahera Utara	65.23	65.55	95.90	95.91	7.23	7.33	595.75	597.63	67.18	67.57	391	402	1.20

Lanjutan Lampiran 1

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan (ribu rupiah ppp)		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
8206	Halmahera Timur	64.66	64.99	95.42	95.44	7.80	7.81	594.34	597.39	67.06	67.50	396	404	1.32
8207	Pulau Morotai	-	64.91	-	93.10	-	6.02	-	578.48	-	64.15	-	461	-
8271	Kota Ternate	69.68	70.07	98.88	98.90	10.61	10.70	632.65	635.01	75.66	76.13	49	42	1.93
8272	Kota Tidore Kepulauan	64.68	64.87	97.60	97.61	8.45	8.55	605.41	608.00	68.90	69.28	321	333	1.21
9100	PAPUA BARAT	67.90	68.20	92.15	92.34	7.67	8.01	593.13	595.28	67.95	68.58	30	30	1.95
9101	Fak-Fak	69.81	70.16	97.17	97.18	8.93	9.09	582.51	585.63	70.24	70.80	244	247	1.89
9102	Kaimana	69.26	69.48	95.48	95.49	7.10	7.32	596.37	599.40	69.27	69.80	304	306	1.72
9103	Teluk Wondama	67.00	67.25	82.85	83.13	6.39	6.44	597.65	600.79	64.79	65.27	441	449	1.36
9104	Teluk Bintuni	67.55	67.88	82.67	82.98	6.85	6.88	596.30	597.49	65.29	65.65	438	446	1.05
9105	Manokwari	67.38	67.67	85.37	85.67	7.59	7.95	584.87	588.11	65.46	66.20	434	437	2.15
9106	Sorong Selatan	66.33	66.49	88.07	88.20	7.90	7.94	585.70	587.90	65.77	66.09	429	439	0.94
9107	Sorong	67.12	67.49	91.39	91.40	8.00	8.04	596.11	597.45	67.82	68.16	367	382	1.04
9108	Raja Ampat	65.43	65.75	92.69	92.77	7.00	7.26	558.87	560.49	63.57	64.08	452	462	1.40
9109	Tambrau	-	66.09	-	76.38	-	4.21	-	440.53	-	49.12	-	489	-
9110	Maybrat	-	66.03	-	89.80	-	6.92	-	580.93	-	64.89	-	454	-
9171	Kota Sorong	71.12	71.53	99.10	99.12	10.52	10.54	633.78	634.63	76.52	76.84	30	30	1.34
9400	PAPUA	68.10	68.35	75.41	75.58	6.52	6.57	599.65	603.88	64.00	64.53	33	33	1.49
9401	Merauke	62.13	62.25	87.10	87.37	8.48	8.63	595.94	597.20	64.44	64.77	445	457	0.94
9402	Jayawijaya	66.06	66.24	51.63	51.65	3.77	3.79	589.09	592.33	54.72	55.09	471	481	0.82
9403	Jayapura	66.96	67.14	96.00	96.31	8.75	9.05	618.26	621.43	71.02	71.66	209	203	2.20
9404	Nabire	67.12	67.33	83.20	83.52	6.46	6.48	612.26	615.25	66.10	66.54	421	431	1.28
9408	Yapen Waropen	67.01	67.52	88.12	88.28	6.50	6.53	631.91	633.24	68.68	69.13	333	341	1.42
9409	Biak Namfor	65.94	66.21	97.48	97.75	9.25	9.26	590.18	592.01	68.99	69.35	313	331	1.16
9410	Paniai	67.10	67.40	62.90	62.91	6.20	6.21	583.44	585.77	59.17	59.53	466	477	0.87
9411	Puncak Jaya	67.21	67.52	86.80	86.81	6.10	6.11	626.46	629.72	67.78	68.21	374	377	1.34
9412	Mimika	69.55	69.87	86.90	87.29	6.70	6.71	606.30	609.20	67.99	68.49	358	361	1.55
9413	Boven Digoel	66.43	66.75	31.70	31.75	3.00	3.10	579.57	580.88	49.20	49.56	475	486	0.72
9414	Mappi	65.79	65.99	31.30	31.35	3.80	3.89	582.77	584.06	49.59	49.88	474	485	0.57
9415	Asmat	66.10	66.66	31.00	31.07	3.86	3.94	589.58	592.21	50.27	50.86	473	484	1.18
9416	Yahukimo	66.25	66.53	31.80	31.81	2.40	2.42	581.79	584.45	48.85	49.22	476	488	0.74
9417	Pegunungan Bintang	65.33	65.55	31.60	31.76	2.20	2.45	579.20	582.55	47.94	48.54	480	492	1.15
9418	Tolikara	65.72	65.84	32.86	32.87	2.40	2.94	608.49	610.64	50.85	51.48	472	483	1.29
9419	Sarmi	66.17	66.26	87.10	87.11	6.40	6.41	611.65	614.73	66.35	66.65	413	425	0.88
9420	Keerom	66.75	66.93	91.10	91.12	7.30	7.32	615.84	618.70	68.55	68.89	340	348	1.07

Lanjutan Lampiran 1

Kode	Provinsi/ kabupaten/kota	Angka harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (persen)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per kapita diseuaikan (ribu rupiah ppp)		IPM		Peringkat IPM (Nasional)		Reduksi shortfall
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
9426	Waropen	64.86	65.19	76.50	76.88	6.27	6.29	602.42	603.76	62.46	62.85	457	468	1.04
9427	Supiori	65.48	65.72	95.37	95.71	7.70	7.97	595.83	597.09	67.55	68.06	382	386	1.56
9428	Membramo Raya	64.86	65.95	64.10	64.11	4.32	4.46	596.11	597.25	57.78	58.57	469	479	1.88
9429	Nduga	65.36	65.50	30.52	30.53	2.78	2.79	570.21	572.79	47.45	47.74	483	497	0.54
9430	Lanny Jaya	65.95	66.12	32.65	32.68	3.10	3.33	565.35	567.59	48.12	48.57	479	491	0.86
9431	Mamberamo Tengah	66.00	66.13	32.12	32.13	2.89	2.90	565.67	568.31	47.90	48.18	481	493	0.54
9432	Yalimo	65.99	66.17	32.24	32.77	2.71	2.72	565.21	567.52	47.75	48.16	482	494	0.78
9433	Puncak	67.09	67.26	32.10	32.11	2.78	2.79	565.78	568.13	48.43	48.71	478	490	0.56
9434	Dogiyai	66.80	66.95	32.53	32.99	3.04	3.43	566.32	568.42	48.60	49.23	477	487	1.23
9435	Intan Jaya	-	66.80	-	27.00	-	1.81	-	585.55	-	47.94	-	496	-
9436	Deiyai	-	66.59	-	26.87	-	2.24	-	584.35	-	48.02	-	495	-
9471	Kota Jayapura	68.23	68.34	99.09	99.10	10.86	10.88	625.93	632.54	74.56	75.16	73	69	2.34
	Indonesia	69.00	69.21	92.19	92.58	7.52	7.72	628.33	631.5	71.17	71.76	-	-	2.06

Lampiran 2. Output Eviews

1. AMH

Dependent Variable: AMH?

Method: GLS (Variance Components)

Date: 12/02/10 Time: 16:22

Sample: 2005 2009

Included observations: 5

Number of cross-sections used: 33

Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	90.9886	2.026753	44.89378	0.0000
Mis?	-0.18509	0.033859	-5.46642	0.0000
Ras?	-0.14316	0.038563	-3.71229	0.0003
MysKrt?	0.753399	0.184304	4.087807	0.0001
PDRBp?	0.000144	6.50E-05	2.214613	0.0282
Random Effects				
_NAD—C	5.019784			
_SUMUT—C	3.523298			
_SUMBAR—C	2.340456			
_RIAU—C	2.33679			
_JAMBI—C	2.510186			
_SUMSEL—C	4.562059			
_BENKULU—C	3.487189			
_LAMPUNG—C	2.595242			
_BABEL—C	2.117141			
_KEPRI—C	-1.06068			
_DKI—C	-1.9916			
_JABAR—C	2.76347			
_JATENG—C	-1.74939			
_DIY—C	-4.9255			
_JATIM—C	-4.24095			
_BANTEN—C	2.278295			
_BALI—C	-8.41055			

Lanjutan Lampiran 2

_NTB—C	-9.76591		
_NTT—C	-2.52282		
_KALBAR—C	-2.92298		
_KALTENG—C	-0.49275		
_KALSEL—C	0.882899		
_KALTIM—C	1.429777		
_SULUT—C	4.852553		
_SULTENG—C	3.688277		
_SULSEL—C	-5.91904		
_SULTRA—C	0.224854		
_GORONTALO—C	5.856106		
_SULBAR—C	-4.32133		
_MALUKU—C	7.592617		
_MALUT—C	2.030124		
_PAPBAR—C	0.596109		
_PAPUA—C	-12.3637		
GLS Transformed Regression			
R-squared	0.98973	Mean dependent var	92.64304
Adjusted R-squared	0.989473	S.D. dependent var	5.626876
S.E. of regression	0.57732	Sum squared resid	53.32774
Durbin-Watson stat	0.908343		
Unweighted Statistics including Random Effects			
R-squared	0.991922	Mean dependent var	92.64304
Adjusted R-squared	0.99172	S.D. dependent var	5.626876
S.E. of regression	0.512025	Sum squared resid	41.94715
Durbin-Watson stat	1.154783		

Lanjutan Lampiran 2**2. MYS**

Dependent Variable: MYS?

Method: GLS (Variance Components)

Date: 12/02/10 Time: 16:37

Sample: 2005 2009

Included observations: 5

Number of cross-sections used: 33

Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.295454	0.377297	16.68569	0.0000
Mis?	-0.02379	0.006056	-3.92788	0.0001
Ras?	-0.03601	0.008851	-4.0687	0.0001
MysKrt?	0.257757	0.038338	6.723219	0.0000
Kons?	0.000119	1.73E-05	6.875296	0.0000
Random Effects				
_NAD--C	1.021505			
_SUMUT--C	0.521344			
_SUMBAR--C	0.167821			
_RIAU--C	0.160607			
_JAMBI--C	-0.29096			
_SUMSEL--C	-0.16356			
_BENKULU--C	0.490647			
_LAMPUNG--C	-0.10966			
_BABEL--C	-0.62587			
_KEPRI--C	-0.33717			
_DKI--C	0.365126			
_JABAR--C	-0.21003			
_JATENG--C	-0.3613			
_DIY--C	0.648257			
_JATIM--C	-0.66796			

Lanjutan Lampiran 2

_BANTEN--C	0.221109
_BALI--C	-0.51311
_NTB--C	-0.38039
_NTT--C	-0.62912
_KALBAR--C	-0.71291
_KALTENG--C	-0.24586
_KALSEL--C	-0.45218
_KALTIM--C	0.590159
_SULUT--C	0.632836
_SULTENG--C	0.163704
_SULSEL--C	-0.21038
_SULTRA--C	0.215826
_GORONTALO--C	-0.18281
_SULBAR--C	-0.59083
_MALUKU--C	1.007403
_MALUT--C	0.743307
_PAPBAR--C	0.037297
_PAPUA--C	-0.30283

GLS Transformed Regression

R-squared	0.978164	Mean dependent var	7.775644
Adjusted R-squared	0.977619	S.D. dependent var	0.918433
S.E. of regression	0.137401	Sum squared resid	3.020668
Durbin-Watson stat	0.885192		

Unweighted Statistics including Random Effects

R-squared	0.986524	Mean dependent var	7.775644
Adjusted R-squared	0.986187	S.D. dependent var	0.918433
S.E. of regression	0.107941	Sum squared resid	1.864194
Durbin-Watson stat	1.43433		

Lanjutan Lampiran 2

3. PPP

Dependent Variable: PPP?

Method: GLS (Variance Components)

Date: 12/02/10 Time: 17:37

Sample: 2005 2009

Included observations: 5

Number of cross-sections used: 33

Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	660.521	5.742801	115.0172	0
Mis?	-1.68217	0.164757	-10.21	0
Gini?	-29.6052	10.33566	-2.86438	0.0047
TPT?	-1.1794	0.185595	-6.3547	0
Kons?	1.862512	0.465514	4.00098	0.0001
Random Effects				
_NAD--C	-2.51509			
_SUMUT--C	0.651212			
_SUMBAR--C	-1.65884			
_RIAU--C	1.727274			
_JAMBI--C	-8.19925			
_SUMSEL--C	1.290655			
_BENKULU--C	7.891274			
_LAMPUNG--C	1.296151			
_BABEL--C	-2.70167			
_KEPRI--C	-13.815			
_DKI--C	-39.4569			
_JABAR--C	3.293096			
_JATENG--C	13.88864			
_DIY--C	25.42565			
_JATIM--C	10.93617			
_BANTEN--C	-1.65262			
_BALI--C	-17.3142			

Lanjutan Lampiran 2

_NTB--C	23.24257
_NTT--C	-11.3001
_KALBAR--C	-8.51181
_KALTENG--C	-12.3989
_KALSEL--C	-8.56751
_KALTIM--C	3.161754
_SULUT--C	-2.34594
_SULTENG--C	7.512411
_SULSEL--C	8.495786
_SULTRA--C	-4.97638
_GORONTALO--C	15.16075
_SULBAR--C	10.14183
_MALUKU--C	13.55608
_MALUT--C	-31.9773
_PAPBAR--C	5.934649
_PAPUA--C	13.78547

GLS Transformed Regression

R-squared	0.951393	Mean dependent var	619.3519
Adjusted R-squared	0.950178	S.D. dependent var	13.9803
S.E. of regression	3.120517	Sum squared resid	1558.021
Durbin-Watson stat	1.058519		

Unweighted Statistics including Random Effects

R-squared	0.964781	Mean dependent var	619.3519
Adjusted R-squared	0.963901	S.D. dependent var	13.9803
S.E. of regression	2.656218	Sum squared resid	1128.879
Durbin-Watson stat	1.460914		

Lanjutan Lampiran 2**4. E0**

Dependent Variable: E0?

Method: GLS (Variance Components)

Date: 12/03/10 Time: 11:02

Sample: 2005 2009

Included observations: 5

Number of cross-sections used: 33

Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	63.31768	0.687317	92.12298	0.0000
Medis?	0.055578	0.008121	6.844104	0.0000
Minum?	0.017761	0.007822	2.270650	0.0245
Dokter?	0.043492	0.018618	2.335977	0.0207

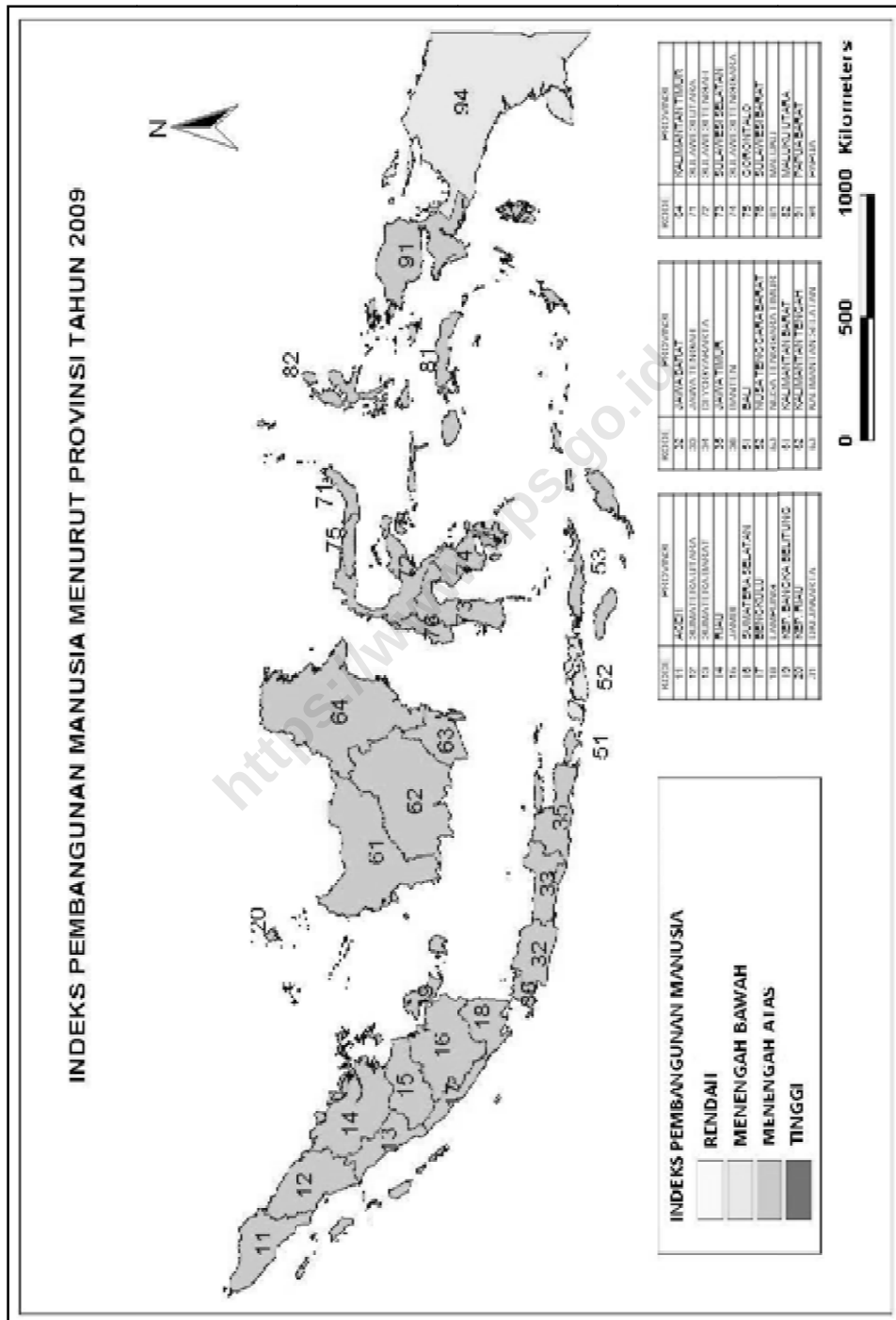
Random Effects

_NAD--C	-0.616937
_SUMUT--C	-0.403809
_SUMBAR--C	-0.716065
_RIAU--C	2.562736
_JAMBI--C	0.950316
_SUMSEL--C	0.439662
_BENKULU--C	0.802152
_LAMPUNG--C	0.658362
_BABEL--C	-0.409577
_KEPRI--C	0.047972
_DKI--C	2.223034
_JABAR--C	-0.606258
_JATENG--C	1.761929
_DIY--C	2.816808
_JATIM--C	-0.583142
_BANTEN--C	-3.727156
_BALI--C	0.259061
_NTB--C	-6.655193

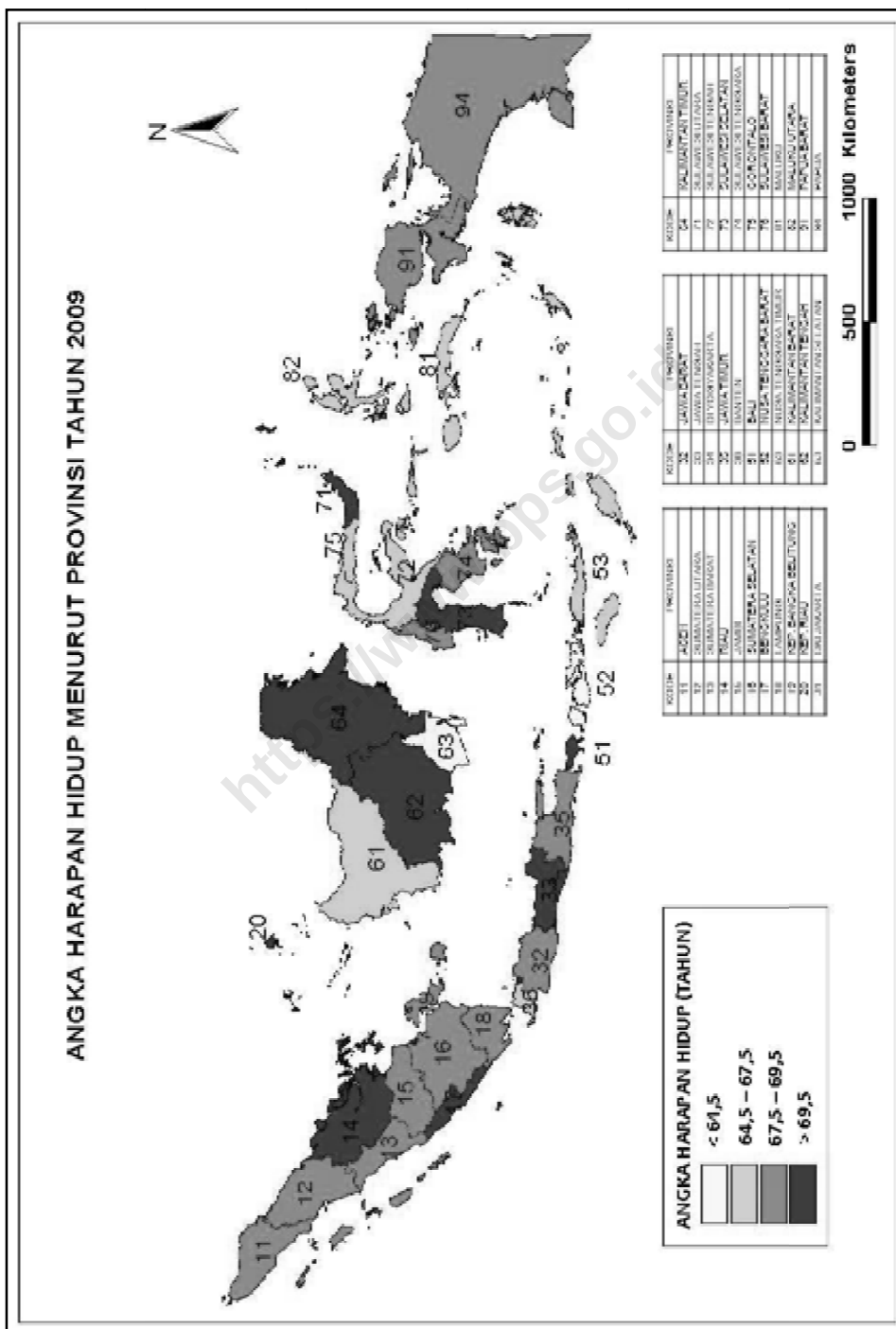
Lanjutan Lampiran 2

_NTT--C	-0.346908		
_KALBAR--C	-0.739237		
_KALTENG--C	3.529834		
_KALSEL--C	-5.415290		
_KALTIM--C	1.588592		
_SULUT--C	2.798649		
_SULTENG--C	-1.507868		
_SULSEL--C	0.912578		
_SULTRA--C	0.315132		
_GORONTALO--C	-0.951493		
_SULBAR--C	1.319573		
_MALUKU--C	-0.420355		
_MALUT--C	-1.287485		
_PAPBAR--C	0.258646		
_PAPUA--C	1.141737		
GLS Transformed Regression			
R-squared	0.985597	Mean dependent var	68.22050
Adjusted R-squared	0.985329	S.D. dependent var	2.650744
S.E. of regression	0.321068	Sum squared resid	16.59659
Durbin-Watson stat	0.888811		
Unweighted Statistics including Random Effects			
R-squared	0.988481	Mean dependent var	68.22050
Adjusted R-squared	0.988267	S.D. dependent var	2.650744
S.E. of regression	0.287130	Sum squared resid	13.27340
Durbin-Watson stat	1.111338		

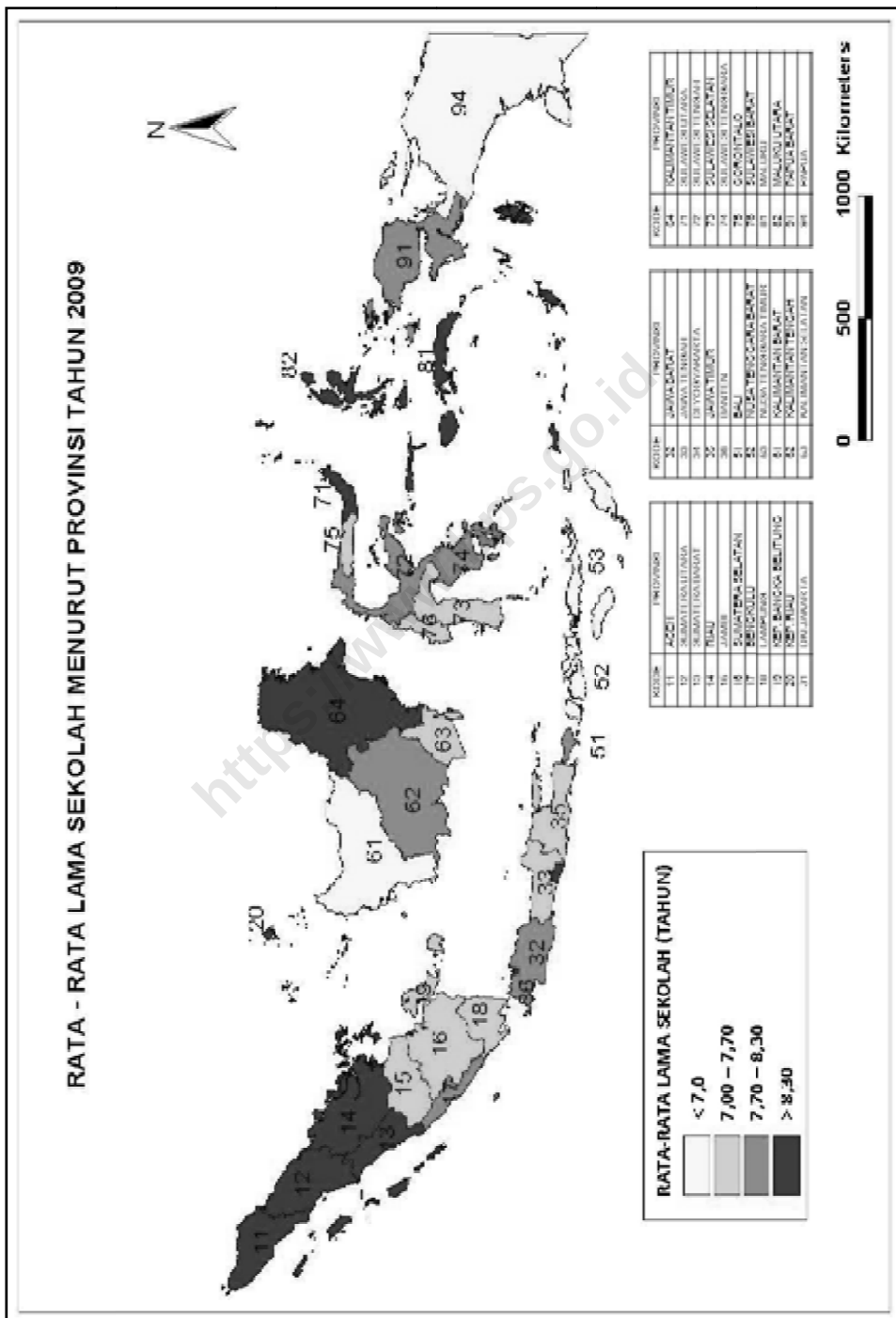
Lampiran 3. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi Tahun 2009



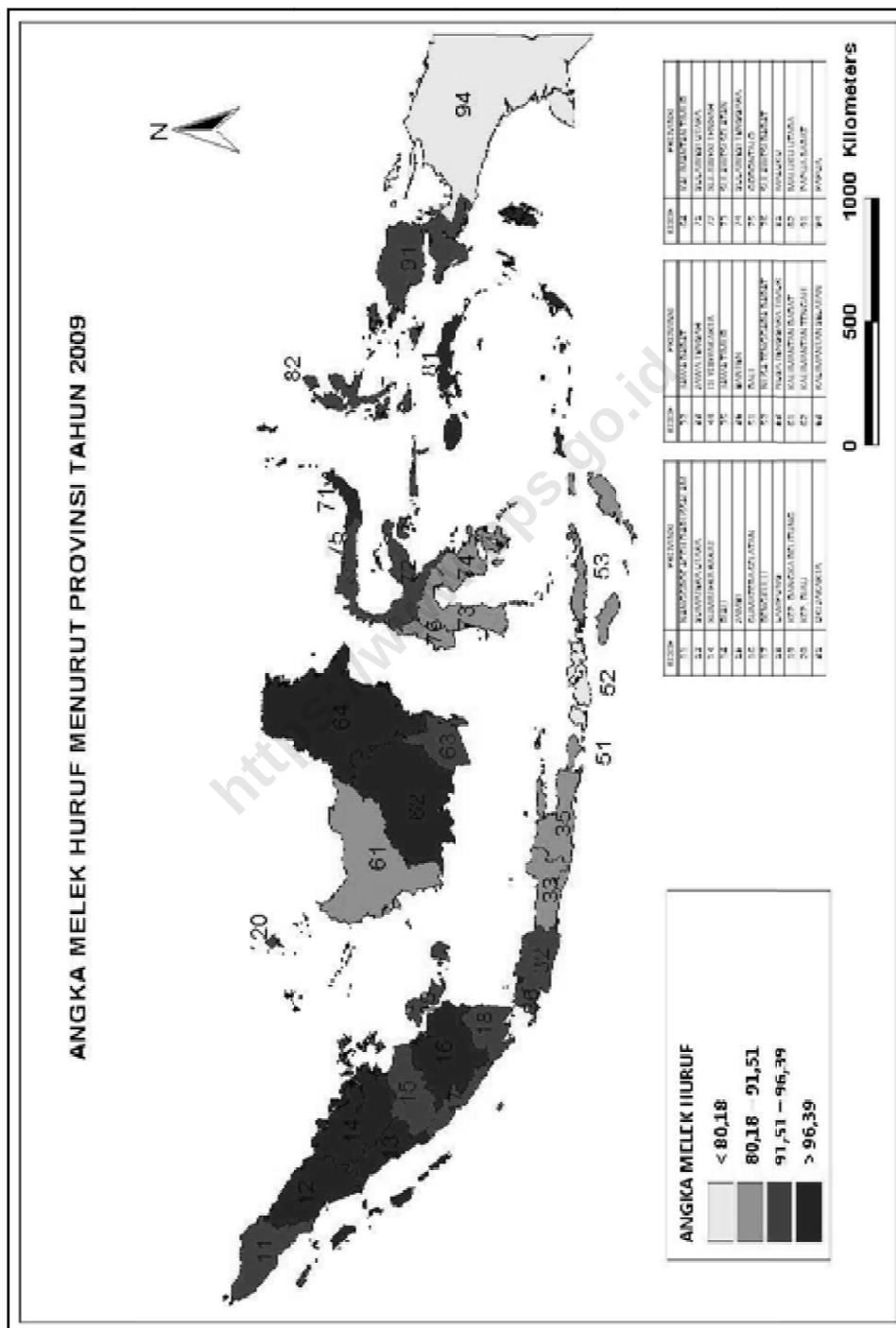
Lampiran 4. Angka Harapan Hidup Menurut Provinsi Tahun 2009



Lampiran 5. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2009



Lampiran 6. Angka Melek Huruf Menurut Provinsi Tahun 2009



PARITAS DAYA BELI MENURUT PROVINSI TAHUN 2009

PARITAS DAYA BELI

< 611,75
611,75 – 625,75
625,75 – 631,75
> 631,75

KODE	PROVINSI	KODE	PROVINSI	KODE	PROVINSI
11	ACEH	30	JAWA BARAT	91	KALIMANTAN BARAT
12	DIYAKARTA	31	JAWA TENGAH	92	KALIMANTAN UTARA
13	SUMATERA BARAT	32	DIYOGANAGARA	93	SULAWESI TENGGARA
14	CELEBE	33	JAWA TIMUR	94	SULAWESI UTARA
15	DIYOGANAGARA	34	DIYOGANAGARA	95	DIYOGANAGARA
16	DIYOGANAGARA	35	DIYOGANAGARA	96	DIYOGANAGARA
17	DIYOGANAGARA	36	DIYOGANAGARA	97	DIYOGANAGARA
18	DIYOGANAGARA	37	DIYOGANAGARA	98	DIYOGANAGARA
19	DIYOGANAGARA	38	DIYOGANAGARA	99	DIYOGANAGARA
20	DIYOGANAGARA	39	DIYOGANAGARA	100	DIYOGANAGARA

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857948

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsinfo@bps.go.id